

TESIS

**PENGARUH FLYPAPER EFFECT TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH DENGAN PAJAK DAERAH SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING PADA KAB/KOTA PROVINSI
SULAWESI SELATAN PERIODE 2014-2017**

*The Influence of Flypaper Effect Towards Regional
Financial Performance with Local Taxes as Intervening
Variables in the Regencies / Cities of South Sulawesi
Province Period 2014-2017*

ANDI ASTI HANDAYANI



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PENGARUH FLYPAPER EFFECT TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PAJAK DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KAB/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2014-2017

The Influence of Flypaper Effect Towards Regional Financial Performance with Local Taxes as Intervening Variables in the Regencies / Cities of South Sulawesi Province Period 2014-2017

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**ANDI ASTI HANDAYANI
A062171004**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PENGARUH FLYPAPER EFFECT TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PAJAK DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KAB/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2014-2017

disusun dan diajukan oleh

ANDI ASTI HANDAYANI
A062171004

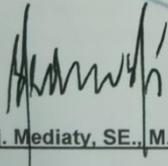
telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **14 Januari 2020**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

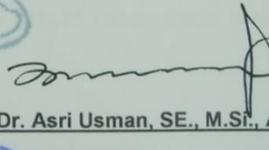
Komisi Penasihat

Ketua

Anggota

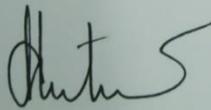


Prof. Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA



Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA

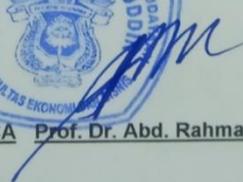
Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. R. A. Damayanti, SE., M.Soc. Sc., Ak., CA



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andi Asti Handayani
NIM : A062171004
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

“Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pajak Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2017”

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2020

Yang membuat pernyataan,

Andi Asti Handayani

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mendapatkan pertolongan dan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pajak Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2017”**. Shalawat dan salam tidak lupa peneliti curahkan kepada Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wassalam* yang menjadi teladan dalam kehidupan manusia dan membawa manusia dari zaman jahilia ke zaman berkeadaban.

Selama proses penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. R. A. Damayanti, SE., M.Soc, Sc., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, sekaligus salah satu tim penguji peneliti.
3. Ibu Prof. Dr.Hj. Mediaty, SE.,M.Si.,Ak.,CA, Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi, membantu, dan menyemangati peneliti selama menempuh studi hingga proses penulisan tesis ini hingga selesai.

4. Bapak Dr. Asri Usman, SE., Ak., M.Si., CA., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, dan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., Ak., M.Soc., CA, Bapak Dr. Amiruddin SE., Ak., M.Si., CA dan Bapak Haryanto., SE., Ak., CA., M.Com., Phd selaku tim penguji yang telah banyak memberikan arahan, kritik dan saran kepada peneliti mulai dari ujian proposal hingga penyelesaian tesis ini.
6. Suami tersayang Sudirman Daeng Raja, S.Pd., M.Ed dan Anandaku tercinta Ahmad Nur Ogie Mapparung terima kasih tak terhingga atas dukungannya untuk Mommy. Sayang kalian selalu.
7. Orang tuaku tercinta, Almarhum Ayahand Andi Ukkas Pannade, SE dan Ibunda Dr. Tuti Supatminingsih SE., M.Si serta adik tercinta Andi Pasca Hasanuddin B.Sc (Hons) kemudian mertuaku tercinta Bapak Ruddin Daeng Rurung dan Mama Sa'be Daeng Sanging yang telah memberikan semangat dan doa, serta dukungan motivasi dan dukungan tanpa henti kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
8. Keluarga besar baik dari pihak ayah ibu dan suami yang tak lekang oleh waktu memotivasi peneliti hingga peneliti bisa menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Akuntansi angkatan 2017, terkhusus MAKSI Reguler B atas bantuan, dukungan, dan kebersamaan selama proses perkuliahan sampai pada akhir studi ini

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna .
Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran, dari berbagai pihak. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 2020

Andi Asti Handayani

ABSTRAK

Andi Asti Handayani, Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pajak Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2017 (Dimbimbing Oleh Mediaty dan Asri Usman)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Flypaper Effect terhadap kinerja keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pajak daerah sebagai variabel intervening. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder dengan jumlah populasi 96 data tentang laporan realisasi anggaran kabupaten / kota provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2014-2017. Laporan ini terdiri dari Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah. Penelitian ini diuji menggunakan analisis jalur dengan bantuan aplikasi spss versi 22.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan untuk variable Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Terhadap Pajak Daerah secara langsung, pengaruh signifikan untuk variable Flypaper Effect pada Dana Bagi Hasil terhadap Pajak daerah secara langsung. Selanjutnya terdapat pengaruh signifikan untuk Variabel Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variable pajak daerah, dan tidak terdapat pengaruh signifikan untuk variable Flypaper Effect Pada Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Daerah secara langsung namun terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung melalui variable pajak daerah.

Kata Kunci : Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum, Flypaper Effect pada Dana Bagi Hasil, Kinerja Keuangan Daerah, dan Pajak Daerah



ABSTRACT

Andi Asti Handayani, The Influence of Flypaper Effect Towards Regional Financial Performance with Local Taxes as Intervening Variables in the Regencies / Cities of South Sulawesi Province Period 2014-2017 (**Supervised by Mediaty and Asri Usman**)

This study aims to examine the influence of the Flypaper Effect towards regional financial performance both directly and indirectly through local taxes as an intervening variable. The type of data used for this research is secondary data with a population of 96 data about the report on the realization of the district / city budget of South Sulawesi province during the 2014-2017 period. This report consists of Realization of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Regional Revenues and Local Taxes. This study was tested using path analysis with the help of the application version 22 spss.

The results showed that there was a significant influence on the variable Flypaper Effect on the General Allocation Funds to the local taxes directly, a significant influence on the Flypaper Effect on the Profit Sharing Funds on local taxes directly. Furthermore, there is a significant influence for the Flypaper Effect on General Allocation Fund Variable towards Regional Financial Performance, either directly or indirectly through local taxes variables, and there is no significant influence for the Flypaper Effect on the Revenue Sharing Funds variable to Regional Financial Performance directly, but there is a significant influence directly and indirectly through local tax variables.

Keywords: Flypaper effect on General Allocation Funds, Flypaper Effect on Revenue Sharing Funds, Regional Financial Performance, and Local Taxes.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.5 Sitematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	16
2.1.1 Fenomena Ilusi Fiskal	16
2.1.2 Teori Stewardship.....	20
2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	21
2.1.4 Flypaper Effect.....	25
2.1.5 Pajak Daerah.....	28
2.2 Tinjauan Empiris.....	29
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	40
3.1 Kerangka Pemikiran	40
3.2 Hipotesis Penelitian	43
3.2.1 Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Pajak Daerah.....	43
3.2.2 Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pajak Daerah.....	45
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	46
4.1 Rancangan Penelitian.....	46
4.2 Jenis dan Sumber Data	46
4.3 Metode Pengumpulan Data	47
4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	47
4.5 Teknik Analisis Data	49

BAB V HASIL PENELITIAN	54
5.1 Deskripsi Data Penelitian.....	54
5.2 Uji Asumsi Klasik Persamaan Y1.....	60
5.3 Uji Normalitas Persamaan Y1.....	61
5.4 Uji Asumsi Klasik Persamaan Y2.....	62
5.5 Uji Normalitas Persamaan Y2.....	64
5.6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
5.7 Pengujian Hipotesis.....	69
BAB VI PEMBAHASAN.....	72
6.1 Pengaruh Flypaper Effect Pada DAU Terhadap Pajak Daerah.....	72
6.2 Pengaruh Flypaper Effect Pada DBH Terhadap Pajak Daerah.....	74
6.3 Pengaruh Flypaper Effect Pada DAU Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pajak Daerah.....	76
6.4 Pengaruh Flypaper Effect Pada DBH Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pajak Daerah.....	77
BAB VII PENUTUP.....	80
7.1 Kesimpulan.....	80
7.2 Implikasi.....	81
7.3 Keterbatasan.....	81
7.4 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi ternyata menciptakan kesenjangan ekonomi yang besar selama masa Orde Baru. Bahkan diperparah oleh krisis ekonomi sehingga menyebabkan pelayanan publik terganggu, dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ditetapkan Undang-Undang Selanjutnya dimana Isi dari Undang-Undang tersebut menyatakan mengenai perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Ilmiah, Dewata, Sarikardawati,2017).

Dalam bidang akuntansi, khususnya bidang Akuntansi Sektor Publik berkembang semakin pesat. Seiring dengan hal tersebut, maka adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sidiq (2017) mengungkapkan Kebijakan otonomi daerah dipandang demokratis dalam memenuhi aspek desentralisasi, kebijakan tersebut diatur dalam UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 23/14, dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dengan UU 33/2004 yang menjadi landasan otonomi, kemudian dijelaskan lebih jauh pengaplikasian hal-hal tersebut melalui beberapa peraturan pemerintah (PP), yang kemudian dipandu dengan Permendagri No. 21/2011.

Menurut Sidiq (2017) Permendagri No. 21/2011 menyiratkan bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelola daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yang meliputi neraca daerah, laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, dan laporan aliran

kas. Dari Laporan APBD tersebut dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau net income), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di anggaran (APBD) maupun dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisi keuangannya baik dibanding yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan informasi yang tersedia di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif agar informasi yang disajikan berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Siregar, 2012).

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun sumber pelaksanaan

desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan yang sah (Saputra, Suwendra, dan Yudiatmadja, 2016).

Rondonuwu dkk. (2015) menyatakan bahwa kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim dan Kusufi, 2016:31). Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membuat peraturan dalam pembangunan daerah sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah wajib untuk diberikan setiap tahunnya (Lucky, 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Ilmiah, Dewata, Sarikardawati (2017), mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Adapun analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Mardiasmo (2009) dalam Sidiq (2017) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mensyaratkan adanya pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*) yang mengiringi pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) sehingga

hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa. Tujuannya untuk menciptakan kondisi ideal dimana kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada.

Salah satu kegiatan belanja daerah juga turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Belanja daerah dapat dibedakan menjadi belanja langsung dan tidak langsung pada layanan komunitas sosial, pengeluaran untuk administrasi dan pengeluaran pada pelayanan ekonomi (Udoka dan Anyingang, 2015). Keynesian teory menyatakan bahwa belanja yang dilakukan pemerintah dapat berfungsi sebagai suatu kebijakan ekonomi yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian disuatu daerah (Menyah dan Rufael, 2013). Argumen ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aydin (2016) yang memperoleh hasil jika belanja pemerintah berada di atas ambang batas maka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumen tersebut juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Amuka (2016) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat menyebabkan terjadinya stabilitas pada perekonomian.

Sebagai daerah yang berotonomi, suatu daerah mampu menunjukkan kemandiriannya dengan melaksanakan pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dimiliki. Setiap potensi pada masing-masing daerah berhak digali oleh pemerintah daerahnya agar memiliki sumber-sumber penerimaan yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, besar kecilnya derajat desentralisasi fiskal merupakan variable dalam mengukur apakah daerah kabupaten/kota bisa

melaksanakan otonomi. Karena sesungguhnya, dambaan dari setiap pemerintah daerah yaitu bisa menjadi daerah yang lebih mandiri.

Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki mampu menghasilkan penerimaan daerah yang sebesar-besarnya menjadi modal daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Dengan adanya penerimaan daerah yang sebesar-besarnya yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat daerah mampu membiayai pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada keuangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat (Junita, Lubis, Zamzami, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dalam industrinya dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya (Hastuti, 2011). Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting dan utama PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan pajak daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target yang ditetapkan, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut. Menurut Halim (2009), permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori *stewardship* didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para manajer dalam perusahaan sebagai pelayan (*steward*) dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada

principalnya, sedangkan Zoelisty dan Adityawarman (2014) mengatakan bahwa stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu untuk dapat meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dan dituntut untuk mampu mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada pada daerah demi kelangsungan dan kemajuan daerah. Potensi tersebut bisa didapatkan salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Dengan banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah, maka diharapkan Pemerintah Daerah memiliki peluang untuk dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah, sehingga kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan

kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah secara optimal. Optimalisasi sumber daya dimaksud termasuk permasalahan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan penerimaan daerah yang sebesar-besarnya menjadi modal daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Dengan adanya penerimaan daerah yang sebesar-besarnya yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat daerah mampu membiayai pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada keuangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan adanya ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, besarnya dana perimbangan yang diterima oleh daerah tentunya akan sangat mempengaruhi kebijakan desentralisasi fiskal daerah. Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan di daerah sangat bergantung pada seberapa besar dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak. (Junita, Lubiz, Zamzami, 2017)

Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi

daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Muda,2012).

Berdasarkan data keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2017, Komposisi Dana Perimbangan lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut mengindikasikan pemerintah masih menggantungkan kegiatan operasionalnya dari APBN.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2017

DAERAH	PAD	DAPER	BELANJA
Kab. Bantaeng	218,634,511,766	2,635,493,528,334	3,364,949,663,121
Kab. Barru	314,497,877,553	2,825,675,416,741	3,478,966,733,710
Kab. Bone	775,928,114,638	5,379,494,032,071	7,614,248,640,056
Kab. Bulukumba	524,971,204,378	3,807,201,218,410	5,352,348,833,495
Kab. Enrekang	240,264,615,665	2,865,802,266,088	3,638,810,914,389
Kab. Gowa	759,640,317,969	4,330,056,695,670	6,061,274,972,656
Kab. Jeneponto	282,868,958,282	3,267,209,719,916	4,192,285,794,875
Kab. Luwu	347,240,639,424	3,420,795,131,517	4,827,094,915,770
Kab. Luwu Utara	467,052,408,576	3,157,283,414,050	4,326,749,342,227
Kab. Maros	620,242,325,060	3,444,377,295,489	4,700,894,450,208
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	592,035,446,484	3,715,228,928,006	5,032,308,756,951

Kab. Pinrang	470,987,428,361	3,288,270,223,302	4,323,776,258,486
Kab. Kepulauan Selayar	373,903,308,965	2,688,513,109,446	3,701,788,635,307
Kab. Sidenreng Rappang	357,965,524,376	3,274,949,498,834	4,282,165,274,541
Kab. Sinjai	315,469,184,287	3,124,157,354,177	3,980,057,919,008
Kab. Soppeng	297,371,254,268	3,100,202,434,815	3,905,310,849,300
Kab. Takalar	393,123,891,791	3,321,172,963,920	4,394,615,989,056
Kab. Tana Toraja	389,649,352,521	2,959,111,274,346	3,772,475,586,709
Kab. Wajo	443,516,695,319	3,557,580,768,968	4,937,021,317,937
Kota Pare-Pare	504,171,952,166	2,529,014,784,252	3,533,119,688,639
Kota Makassar	2,709,450,598,615	5,756,093,738,445	10,429,421,509,822
Kota Palopo	448,656,207,539	2,611,767,986,709	3,425,341,368,096
Kab. Luwu Timur	1,804,563,752,990	3,795,546,281,536	6,819,776,979,268
Kab. Toraja Utara	144,984,786,524	2,625,796,214,891	3,324,302,234,493

**Sumber : Data Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
Periode 2014-2017**

Junita, Lubis, Zamzami (2017), menyatakan masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi menjadikan adanya ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, besarnya dana perimbangan yang diterima oleh daerah tentunya akan sangat mempengaruhi kebijakan desentralisasi fiskal daerah. Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan di daerah sangat bergantung pada seberapa besar dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Transfer antar pemerintah sebagai bentuk dari kebijakan pelaksanaan otonomi dalam mengatasi fiscal gap merupakan salah satu sumber penerimaan penting pemerintah daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul dalam pembangunan

antar daerah (Oates dalam Kuncoro,2007, dalam Amril 2015). Meskipun demikian pemberian transfer juga mengakibatkan ketidakefektifan pembiayaan pengeluaran daerah. Fenomena tersebut dikenal dengan *flypaper effect* yang mengandung pengertian: (1) terjadinya peningkatan pajak dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan, (2) elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap pajak daerah.

Menurut Afrizawati (2012) dalam Ekawarna (2017) *flypaper effect* merupakan respon yang tidak simetri atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, yang mana dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat.

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi dimana respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri (Mello, 2002; Hines, 1995). Fenomena ini terjadi karena sistem penentuan dana perimbangan dari pusat ke daerah kurang efektif. APBN memberikan dana perimbangan kepada daerah agar mampu melaksanakan operasional pelayanan publik dengan lebih layak. Dana perimbangan dari APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU dan DBH merupakan transfer kategori tak bersyarat atau *unconditional transfer*. DAK merupakan *conditional transfer* atau transfer bersyarat (Iskandar, 2012). Hal ini menyebabkan pemerintah daerah cenderung lebih mengutamakan belanja daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan daerah dalam memproduksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Eksplorasi terhadap PAD tidak dilakukan secara optimal, tetapi sebaliknya pemerintah daerah lebih merespon dana transfer dari pusat (Ekawarna, 2017).

Pentury (2011), mengemukakan bahwa untuk mengetahui apakah terjadi flypaper effect atau tidak di suatu daerah, maka dapat dilakukan dengan dua (2) cara yaitu (1) dengan melihat pengaruh dari PAD. Jika PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi *flypaper effect*, dan (2) dengan melihat nilai koefisien dari variabel independent, yaitu DAU, DAK, DBH dan PAD. Jika nilai koefisien yang dimiliki oleh PAD lebih besar dari nilai koefisien yang dimiliki oleh DAU, DAK dan DBH terhadap belanja daerah maka dapat dikatakan tidak terjadi *flypaper effect*. Sedangkan sebaliknya jika nilai koefisien yang dimiliki oleh salah satu yang berasal dari transfer daerah yaitu DAU, DAK, dan DBH lebih besar daripada nilai koefisien dari PAD maka dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect*.

Untuk Kab/Kota Makassar berdasarkan Data pada lampiran table 1.2 hasil uji menyatakan bahwa terjadi flypaper effect selama tahun 2014-2017 pada Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil namun tidak terjadi pada Dana Alokasi Khusus.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-	52243176950.5			
	15917756005.6	54		-.305	.761
	85				
PAD	1.037	.112	.388	9.283	.000
DBH	1.848	.499	.112	3.705	.000
DAU	1.382	.101	.542	13.665	.000
DAK	.487	.120	.105	4.046	.000

Tabel 1.1 Olah data untuk melihat fenomena flypaper effect berdasarkan LRA 2014-2017 yang diolah oleh penulis.

Di Indonesia sendiri, beberapa penelitian tentang *flypaper effect* pada berbagai daerah menghasilkan kesimpulan dan nilai yang berbeda. Oktavia (2014) melakukan penelitian mengenai *flypaper effect* pada Kabupaten Kota Di Jawa Timur. Didapat hasil akhir, bahwa *flypaper effect* berlaku di DAU pada belanja daerah. Melihat peneliti pendahulunya, Mentayani (2012) melakukan penelitian yang sama pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hasil yang diperoleh berbeda dengan penelitian Oktavia (2014) yaitu PAD memiliki pengaruh lebih besar dari pada DAU terhadap belanja daerah, jadi kesimpulannya kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tidak mengalami *flypaper effect*. Irham (2015) yang melakukan studi *flypaper effect* di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* yang ditunjukkan dengan efek DAU lebih signifikan dari belanja daerah dari pada efek PAD dari belanja daerah Provinsi Aceh sehingga pada umumnya terjadi *flypaper effect* dapat dibuktikan. Studi selanjutnya dilakukan oleh Purbarini dan Masdjojo (2015) yang menunjukkan hasil tersendiri dimana terjadi pada belanja operasi pemerintah kota di Indonesia. *flypaper effect* tidak berpengaruh untuk belanja modal pemerintah kota di Indonesia. DAU berpengaruh tidak signifikan dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Santoso dkk (2015) meneliti tentang *flypaper effect* di Provinsi Lampung dengan hasil yang menunjukkan bahwa PAD dan DAU saling berkaitan serta memiliki ikatan positif untuk pembelanjaan di daerah kab/kota di Provinsi Lampung. Hasil koefisien pengaruh DAU sangat besar daripada nilai koefisien PAD serta kedua perbedaan kedua nilai tersebut sangat drastis. Hal tersebut memperlihatkan terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kab/kota di Provinsi Lampung.

Meskipun studi mengenai *flypaper effect* dari efek PAD ataupun DAU dari Pembelanjaan Daerah telah banyak dilakukan, tetapi hasil dari penelitian-

penelitian tersebut tak bisa digunakan diseluruh Indonesia, dikarenakan masing-masing pemerintah daerah mempunyai kondisi pendanaan yang berbeda.

Berdasarkan Latar Belakang Tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pajak Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2017. perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel pajak daerah sebagai variabel antara (*intervening*) untuk memediasi pengaruh DAU, dan DBH yang terindikasi terjadi *flypaper effect* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Asumsi penggunaan variabel *intervening* adalah dengan meningkatnya pajak daerah merupakan bentuk optimalisasi realisasi pemanfaatan DAU, dan DBH, dapat mendorong tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Flypaper Effect Pada DAU berpengaruh Langsung terhadap pajak daerah di Kab/Kota Sulawesi Selatan?
2. Apakah Flypaper Effect Pada DBH berpengaruh Langsung terhadap pajak daerah di Kab/Kota Sulawesi Selatan?
3. Apakah *Flypaper Effect* pada DAU berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kab/Kota Sulawesi Selatan?
4. Apakah *Flypaper Effect* pada DBH berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kab/Kota Sulawesi Selatan?
5. Apakah *Flypaper Effect* pada DAU mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah secara tidak langsung melalui Pajak Daerah di Kab/Kota Sulawesi Selatan?

6. Apakah *Flypaper Effect* pada DBH mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah secara tidak langsung melalui Pajak Daerah di Kab/Kota Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui adanya pengaruh *Flypaper Effect* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui pajak daerah Pada Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang praktek kinerja keuangan daerah pada organisasi sektor publik.
- b. Memberikan wacana alternatif bagi praktisi mengenai pengaruh dan flypaper effect terhadap kinerja keuangan daerah di Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, mengenai pengaruh flypaper effect terhadap kinerja keuangan daerah di Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dan struktur penulisan tesis ini terdiri dari 7 bab:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan landasan teoritis yang menjelaskan teori-teori pendukung perumusan hipotesis, didukung dengan penelitian terdahulu.

Bab III : Kerangka Pemikiran Teoritis. Bab ini menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).

Bab IV : Metode Penelitian. Bab ini dijelaskan definisi operasional yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel-variabel dalam penelitian. Metode analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis yang digunakan dalam penelitian

Bab V : Berisi mengenai hasil penelitian , hasil analisis data dan mendeskripsikan objek penelitian

Bab VI : Berisi mengenai pembahasan uji pengaruh apakah sesuai dengan hipotesis yang diajukan

Bab VII : Merupakan kesimpulan dari penulisan tesis sekaligus berisi saran mengenai penelitian selanjutnya dan juga menambahkan keterbatasan penelitian (optional).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Fenomena Ilusi Fiskal

Teori ilusi fiskal pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Italia yang bernama Amilcare Puviani. Amilcare Puviani menggambarkan ilusi fiskal terjadi saat pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan yang mampu merubah perilaku keuangan. Mueller (1989) sebagaimana dikutip oleh Dollery dan Worthington (1999) memberikan pengertian definisi ilusi fiskal kontemporer sebagai berikut : *To bring about an increase in government size, for which citizens are not willing to pay voluntary, the legislative – executive entites must increase citizens tax burdens in such a way that citizens are unaware that they are paying more taxes if tax burdens can be disguised in this way, citizens have the illusion that the government is smaller than it actually is and government can grow beyond the levels citizens prefer.* Defenisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan sedemikian rupa, sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada persepsi/ penilaian maupun pada tindakan/perilaku tertentu. Ilusi fiskal dapat dideteksi baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran, maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal. Berkaitan dengan hal itu Dollery dan Worthington (1996) memberikan pengertian lebih mendasar tentang ilusi fiskal sebagai berikut:

The concept of fiscal revolves around the proposition that the true cost and benefit of government may be consistenly misconstrued by the citizenry of a given fiscal jurisdictions. The empirical analysis of fiscal illusion has been directed almost exclusively at revenue side of fiscal equation with corresponding neglect benefit of

public sector activity. Pendapat yang disampaikan kedua peneliti ini menegaskan bahwa berbagai penerimaan harus memberikan benefit adanya peningkatan aktivitas layanan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri. Bila realitas yang terjadi justru berlawanan maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal. Menurut Hewitt (1989) dalam Kuncoro (2007) Ilusi fiskal ini terjadi karena asimetris informasi Pemerintah pusat tidak memahami sepenuhnya kapasitas fiskal daerah dan situasi seperti ini justru dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan kebutuhan fiskalnya (meningkatkan belanja) dalam rangka untuk memperoleh dana transfer yang besar (khususnya DAU). Menurut khasanah ekonomi, telaah mengenai *flypaper effect* dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang dari birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya (Kuncoro, 2007). Oates dalam Kuncoro (2007) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah. Fillimon, Romer, dan Rosenthal (1982) mengembangkan hipotesis ilusi fiskal dalam konteks ketidaktahuan masyarakat akan jumlah transfer yang diterima. Dalam kasus ini, pemerintah daerah menyembunyikan jumlah transfer yang diterima dari pusat dan kemudian membelanjakannya pada level puncak. Akibatnya, masyarakat memandang telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah daerah dengan kenaikan yang lebih tinggi daripada kenaikan kuantitas yang diminta sebagai

cerminan dari kenaikan pendapatannya. Deteksi Ilusi Fiskal Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, dua diantaranya adalah melalui pengukuran pendapatan (revenue enhancement) (Bergstrom dan Goodman, (1973) Dollery dan Worthington, (1999) dan melalui manipulasi belanja (*expenditure manipulation*). Pengukuran dengan menggunakan pengukuran pendapatan mengasumsikan bahwa komponen penerimaan mempunyai hubungan positif dengan belanja. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengukuran ilusi fiskal dengan Pengukuran Pendapatan (Revenue Enhancement). Menurut Adi (2009) Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabelvariabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal. Sedangkan pengukuran dengan manipulasi belanja, deteksi terjadinya ilusi fiskal dilakukan dengan melihat peran/kontribusi masing-masing komponen penerimaan terhadap peningkatan anggaran. Komponen belanja dimanipulasi (dihilangkan), sehingga diasumsikan sama (*ceteris paribus*) dengan besarnya penerimaan daerah itu sendiri. Semakin besar penerimaan daerah maka besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya juga menjadi semakin besar. Maimunah (2006) dalam Ekaristi (2008) Secara umum (menurut APBD), penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Tujuan dari pemberian dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Dengan peningkatan standar pelayanan publik, diharapkan PAD juga mengalami peningkatan. DAU yang besar diharapkan dapat memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD baik yang berupa pajak maupun retribusi. Dollery dan Worthington (1996) dalam Ekaristi (2008) mengindikasikan adanya keuntungan yang didapat

pemerintah daerah dengan melakukan ilusi fiskal melalui peningkatan belanja dan penurunan pendapatan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang lebih besar. Pengukuran peningkatan belanja dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran DAU, untuk melihat kesesuaian alokasi DAU dengan kebutuhan daerah. Untuk melihat adanya indikasi ilusi fiskal dalam anggaran belanja dan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadinya ilusi fiskal, dapat dilakukan dengan menganalisis pertumbuhan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan realisasi PAD. Pemerintah pusat dapat mengetahui seberapa efektif dana bantuan yang diberikan untuk meningkatkan PAD, bila dibandingkan dengan belanja daerah. Penelitian terkait oleh Holtz-Eakin (1985) dalam Ekaristi (2008) menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek lebih ditentukan oleh transfer yang diterima oleh pemerintah pusat. Idealnya semua komponen penerimaan daerah mempunyai korelasi yang positif terhadap besarnya belanja daerah. Peningkatan belanja daerah diharapkan memprioritaskan aspek pelayanan publik, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan (peningkatan pertumbuhan ekonomi) dan pada gilirannya terjadi peningkatan kontribusi pajak maupun retribusi dari masyarakat. Gemmel dkk (1998) dalam Elaristi (2008) menunjukkan naiknya anggaran belanja daerah sebagai upaya untuk mendapatkan jumlah transfer yang besar. Diamond (1989) dan Ashworth (1995) dalam Ekaristi (1998) menemukan terjadinya ilusi fiskal melalui adanya hubungan yang negatif antara pengeluaran pemerintah dengan pajak tidak langsung dan rasio pengeluaran yang digunakan untuk belanja.

2.1.2 Stewardship Theory

Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori stewardship didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para manajer dalam perusahaan sebagai pelayan (steward) dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya,

sedangkan Zoelisty dan Adityawarman (2014) mengatakan bahwa *stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers* atau *principals*) mempercayakan (*trust = amanah*) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward = manajemen*) yang lebih capable dan siap.

Menurut Etty Murwaningsari (2009) Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sector publik dengan teori *stewardship*.

Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2.1.3 Federalisme Fiskal

Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kajian tentang federalisme fiskal (*fiscal federalism*), terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu *traditional theories (first generation theories)* dan *new perspective theories (second generation theories)*. *Traditional theories* menyatakan terdapat dua keuntungan dari desentralisasi, yaitu:

1. Hayek (dalam Khusaini, 2006) mengemukakan tentang penggunaan “*knowledge in society*”, dimana menurut Hayek pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya.
2. Tiebout (dalam Khusaini, 2006) mengungkapkan terdapat dimensi persaingan dalam pemerintah daerah dan ia berpandangan bahwa kompetisi antar pemerintah daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Hal ini tidak akan terjadi dalam pemerintahan sentralistik jika pemerintah pusat menyediakan barang dan jasa publik secara seragam.

Aristovnik (2012) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi dua luas kategori yaitu: otonomi fiskal pemerintah daerah, dan pentingnya fiskal pemerintah daerah. Dengan menerapkan sistem pemerintahan terdesentralisasi, pemerintah daerah akan dikejar untuk meningkatkan usahanya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di wilayahnya (Suhardjanto, dkk., 2009).

Federalisme fiskal menampilkan model normatif yang menggambarkan pemerintah pusat sebagai penafsir arif aspirasi masyarakat, yang memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan untuk menjamin lembaga-

lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai keinginan pusat (dengan asumsi sesuai keinginan seluruh rakyat). Bahkan sekalipun tak semua pemerintah pusat tidak sedemikian arif, aturan-aturan ini mungkin masih dapat memberikan rujukan yang bermanfaat dalam hubungan fiskal antar pemerintahan (Bird, 1998).

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan pencapaian dari suatu usaha entah itu berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dan tentunya dari segi outcome. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja dengan melihat variabel kunci kemudian dikembangkan pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, dari sinilah kita bisa mengetahui kinerja suatu organisasi sudah sesuai dengan yang direncanakan meliputi ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain atau tidak. Jika tidak tercapai maka dikatakan bahwa pengukuran kinerja suatu organisasi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dan jika pencapaiannya melebihi dari yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa entitas tersebut memiliki kinerja yang sangat baik (Halim, 2012: 142).

Kinerja keuangan adalah analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Menurut Sularso dan Restianto (2011) kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dalam sektor pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010). Kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Patarai dan Mattotorang,2016). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi dalam Soedarsa dan Putri, 2014)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan

laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi dalam Soedarsa dan Putri 2014): (1) Kemampuan struktural organisasinya yaitu struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas. (2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah, yaitu aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah. (3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat ,yaitu Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan. (4) Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.1.4.1 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) : Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah, Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Adapun Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Abdul Halim 2007:230) terdiri dari : Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.4.2 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi : (1) Indikator Masukan (Inputs) : Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan. (2) Indikator Proses (Process) : Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. (3) Indikator Keluaran (Output) : Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang

dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa. (4) Indikator Hasil (Outcome) : Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai (5) Indikator Manfaat (Benefit) : Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat. (6) Indikator Dampak (Impact) Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.(Mahsun dalam Mokodompit dkk,2014)

2.1.5 Flypaper Effect

Menurut Maimunah (2006), flypaper effect merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak/boros dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU (Dana Alokasi Umum) daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi. Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Anomali tersebut memicu diskusi yang instensif di antara ahli ekonomi. Perdebatan tersebut menghasilkan beberapa penjelasan yang ditawarkan. Dalam khasanah ekonomi, telaah mengenai flypaper effect dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu model birokratik

(bureaucratic model) dan ilusi fiskal (fiscal illusion model). Model birokratik menelaah flypaper effect dari sudut pandang birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

Amril (2015) menyatakan fenomena flypaper effect dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti flypaper effect merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah. Lebih jauh, ilusi fiskal diartikan sebagai kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai pembiayaan maupun alokasi anggaran dan keputusan mengenai kedua hal tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini.

Turnbull dalam Ekawarna (2017) menawarkan penjelasan lain mengenai keberlanjutan kesalahan persepsi tersebut. Menurut Turnbull, ketidakpastian tingkat harga barang publik akan menciptakan risiko. Risiko ini dalam jangka panjang akan memicu pengeluaran yang berlebih. Becker (1996) dalam Ekawarna (2017) mengidentifikasi beberapa isu yang selalu muncul dalam pembahasan mengenai flypaper effect. Salah satu isu yang penting adalah respon yang tidak simetri terhadap perubahan transfer. Teori perilaku konsumen di atas menjelaskan bahwa respon terhadap perubahan transfer seharusnya indifferent. Hal ini berarti bahwa pengaruh perubahan transfer pada perilaku fiskal pemerintah daerah akan sama terlepas apakah sumbangan tersebut diperoleh melalui tuntutan kenaikan atau melalui serangkaian kenaikan lalu dikurangi secara gradual.

Gramlich dalam Amril (2015) menyatakan dalam kasus keuangan daerah ada respon yang tidak simetri terhadap perubahan besaran transfer. Ia menjelaskan

bahwa transfer diberikan untuk jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut, pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer mulai meningkat. Setelah transfer dikurangi, mereka melakukan lobi untuk mempertahankan keuntungannya melalui kenaikan pajak. Oates (1994) mengemukakan karena alasan politis belanja pemerintah daerah bisa jadi tidak sensitif terhadap penurunan transfer yang menunjukkan flypaper effect terjadi dalam satu arah. Oates menjelaskan bahwa fenomena flypaper effect yang terjadi secara tidak simetri disebabkan oleh perilaku birokrat pemerintah daerah dan konsumen yang cenderung menghindari kerugian (loss aversion) dan kelangkaan kemudahan (lack of fungibility) atas penggunaan transfer.

Pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya cenderung lebih sensitif terhadap penurunan kesejahteraan daripada sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melakukan penggantian sumber pembiayaan anggaran (fiscal replacement), biaya politik atas kenaikan pajak menjadi lebih besar daripada keuntungan politik yang diperoleh pemerintah atas pengurangan pajak. Lebih lanjut, birokrat pemerintah daerah dan masyarakat memandang bahwa kemudahan transfer yang diterima pada saat yang sedang berjalan tetap memiliki nilai sekarang (present value) yang lebih tinggi daripada jumlah transfer yang diterima pada waktu-waktu yang akan datang meskipun dengan nilai sekarang yang lebih tinggi. Dengan demikian, fungsibilitas transfer tersebut akan memberikan pengaruh konsumsi yang jauh lebih besar. Hal ini memberikan implikasi lebih lanjut bahwa masyarakat akan menggunakan aspek fungsibilitas transfer ini untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya.

2.1.6 Pajak Daerah (TAX)

Pajak merupakan iuran yang dapat di paksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat di tunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi

budget) dan sebagai alat untuk mengukur (fungsi regulator) (Miyasto,2009). Menurut Undang-Undang No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak, adalah iuran wajib yang di lakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dari batasan atau definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah: a. Iuran masyarakat kepada Negara b. Berdasarkan undang-undang c. Tanpa balas jasa secara langsung d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah

2.2. Tinjauan Empiris

Beberapa Penelitian Terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini,yaitu :

Marissa Ayu Saputri, Dul Muid (2014). Melakukan penelitian pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2011-2012.Populasi dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2011 sampai 2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PAD dan DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Adanya flypaper effect dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD . dan penelitian ini mengindikasikan bahwa flypaper effect tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu, penelitian ini menggunakan variabel dependent adalah belanja modal dan variabel independennya dalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan belanja pegawai, investasi pemerintah daerah, pembayaran utang pemerintah daerah

sebagai variable independen dan fenomena flypaper effect sebagai variabel dependennya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai flypaper effect.

Rina Anita, Dwi Fitri Puspa, Herawati (2013), melakukan penelitian pada 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota dan menyajikan laporan keuangan Kabupaten/Kota dan Realisasi APBD yang dikeluarkan Pemerintah Daerah pada periode tahun 2007 – 2011. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Flypaper effect. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Belanja Pegawai, Investasi dan Pembayaran Utang. Hasil penelitian ini adalah belanja pegawai, investasi pemerintah dan pembayaran utang pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap fenomena flypaper effect pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan penelitian ini adalah pada periode penelitian dan wilayah penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2007-2011. Penelitian sekarang meneliti pada 26 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2009-2011. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel dependen dan independen yang sama serta analisis data yang digunakan untuk meneliti yaitu analisis regresi logistik.

Ida Mentayani, Nurul Hayati, Rusmanto (2012), melakukan penelitian pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan 2 Kota dan 11 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Model yang digunakan untuk menganalisis data adalah model regresi linier berganda. Variabel Independen dari penelitian ini adalah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Variabel Dependennya adalah Belanja Daerah. Menurut hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah dan dana alokasi umum secara signifikan mempengaruhi belanja daerah di kota-kota di provinsi Kalimantan Selatan. Efek bahwa pendapatan asli daerah memiliki pada belanja daerah lebih besar daripada apa yang dana alokasi umum memiliki. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa flypaper effect

tidak terjadi pada keuangan daerah kota dan kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010.

Ahmad Burhanudi (2012), melakukan penelitian mengenai Fenomena Flypaper effect. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 daerah di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2009 hingga 2011. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat yang digunakan penelitian adalah regresi logistik. Variabel yang digunakan adalah Variabel Independen yaitu, Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Utang Pemerintah Daerah dan Variabel Dependennya yaitu Flypaper effect. Hasil dari penelitian ini adalah Belanja Pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap flypaper effect. Sedangkan Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap flypaper effect. Perbedaan penelitian ini terletak pada daerah yang diteliti dan tahun penelitian.

Bambang Agus Pramuka (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Agus Pramuka yaitu menganalisis apakah ada flypaper effect dalam pengeluaran pemerintah daerah, dan apakah ada pengaruh yang signifikan dari hibah pemerintah pusat dan pendapatan asli pemerintah daerah pada pengeluaran mereka terutama pada pengeluaran operasional dan modal. Penelitian dilakukan pada kabupaten dan kota di Jawa tahun 2005 hingga 2008, dan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah flypaper effect tidak ditemukan dan menyimpulkan bahwa pemerintah setempat tidak mengandalkan hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber dari anggaran mereka. DAU dan PAD secara signifikan mempengaruhi operasi, modal, dan total pengeluaran pemerintah daerah, untuk tahun yang bersangkutan dan tahun bersangkutan.

Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono (2009), melakukan penelitian mengenai Flypaper effect pada Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008. Variabel

Independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus. Sedangkan variabel Dependennya adalah Belanja Daerah. Obyek penelitian adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah menyampaikan Laporan Keuangan berupa Pendapatan dan Pengeluaran. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan model regresi dan telah memenuhi asumsi-asumsi ekonometrika. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil perbandingan uji statistik t, sig, Korelasi dan Koefisien Determinasi dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah adalah lebih besar daripada nilai-nilai statistik Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah Jawa Tengah.

Pablo Acosta (2010). Melakukan penelitian di Argentina. Penelitian ini memberikan perkiraan "flypaper effect" dengan mengambil sampel sebanyak 124 kota di Provinsi Buenos Aires (Argentina). Variabel Independennya adalah belanja modal. Variabel dependent adalah flypaper effect. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa meski "flypaper effect" masih berlaku dengan adanya efek penyebarannya atau perilaku dari seluruh wilayah hukum, hal itu bisa berlebihan dengan adanya saling ketergantungan spasial. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tingkat "flypaper effect" yang tinggi bisa terjadi dengan mengabaikan hubungan antara belanja daerah dan perilaku tetangga. Secara keseluruhan, kesimpulan ini terkait erat untuk Kasus et al. (1993) temuan untuk daratan 48 negara bagian AS, dengan metode OLS overestimating "flypaper effect". Pemerintah daerah dapat terlibat dalam kompetisi tolak ukur dalam penyediaan barang publik, mereka mungkin juga bersaing untuk transfer dari pemerintah pusat, yang biasanya bersamaan tersedia untuk semua wilayah hukum lokal pada waktu yang sama. Sebuah korelasi positif antara persaingan tolak ukur dan kompetisi mentransfer berpotensi bisa menjelaskan seperti terlalu tinggi dari yang

sebenarnya "flypaper effect" , serta pembayaran bunga dan pengembalian pajak. Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel yaitu peneliti menggunakan 124 kota di Provinsi Buenos Aires (Argentina). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fenomena flypaper effect

Penelitian yang dilakukan oleh Wahab dkk tahun 2014 menyatakan bahwa kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2010-2014 diukur berdasarkan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, masuk dalam kriteria daerah dengan tingkat ketergantungan yang masih Sangat Tinggi. Hal inilah yang menyebabkan tingkat Kemandirian Daerah Sangat Kurang, sehingga dengan sendirinya tingkat Desentralisasi Fiskal juga masuk dalam kriteria sangat kurang. Namun, efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Jayapura sudah Sangat Efektif, dan Efisiensi pengelolaan PAD juga sudah menunjukkan hasil yang Sangat Efisien, akan tetapi harus tetap ditingkatkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura terhadap pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Junita,Lubiz,Zamzami menyimpulkan bahwa Desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi .masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari nilai rata-rata indikator otonomi desentralisasi fiskal hanya sebesar 5,32%. Nilai ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat.Kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.dilihat dari efisiensi anggaran masih belum efisien yang terlihat dari rata-rata rasio efisiensi masih di bawah 100%. Sementara itu rasio efektivitas PAD tergolong efektif dengan nilai rata-rata di atas 100%.Desentralisasi fiskal, berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Maisyuri tahun 2014 menyimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja

keuangan Pada Pemerintah Aceh Utara dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Pada Pemerintah Aceh Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Enceng Dkk menyimpulkan bahwa Penerimaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purworejo sebagian besar dananya masih bersumber dari Alokasi Pemerintah Pusat, dengan rata-rata mencapai 82,68 % per tahun sedangkan PAD hanya mencapai 7,99 % per tahun

Hasil penelitian Detisa (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian Detisa (2010) dan Rondinelli, Mc. Cullough, dan Johnson (1989) tidak searah dengan Nasution (2010) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Muid tahun 2014 menyimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Atau dengan kata lain, pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih distimulus oleh jumlah DAU yang diterima pada tahun berjalan daripada PADnya sendiri. Ini membuktikan adanya flypaper effect dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD.

Prakosa (2004), Masdjojo (2009), dan Maimunah (2006). Para peneliti tersebut mengkaji pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah dengan mengambil sampel kabupaten/kota di Jawa Tengah, DIY, se-Indoensia dan Sumatera. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak semua PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan tidak semua PAD memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah dan tidak semua DAU mengalami flypaper effect.

Penelitian mengenai *Flypaper effect* telah banya dilakukan, baik luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Penelitian oleh Kakamu, dkk dalam Journal of Economic Modelling pada tahun 2014 yang bertujuan untuk menentukan model SUR untuk menguji *Flypaper effect* di Jepang, terutama karena kategori pengeluaran lain

memengaruhi pengeluaran pada tujuan kebijakan tertentu. Penelitian ini menggunakan model persamaan *Seemingly unrelated regression (SUR)* untuk menjelaskan *Flypaper effect* di Jepang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memperkirakan *Flypaper effect* menggunakan model SUR menggabungkan ketergantungan spasial. Peneliti tidak menemukan bukti *Flypaper effect* pada total pengeluaran dalam analisis percontohan. Jadi, dalam analisis ini, kami malah memeriksa pengeluaran untuk tujuan kebijakan khusus. Strategi ini mengarah pada pengidentifikasian *Flypaper effect* dalam kategori pengeluaran tertentu di Jepang.

Hasil yang sama pada penelitian Allers (2016) dalam penelitiannya yang bertujuan menentukan kemungkinan konsekuensi dari efek flypaper sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan metode estimasi sistem yang mewujudkan metode least square method (OLS), metode kuadrat terkecil dua tahap (2SLS) dan metode kuadrat terkecil tiga tahap (3SLS) dan esensi untuk menerapkan tiga metode estimasi adalah untuk menemukan dan jika perlu menyediakan untuk masalah endogen dan korelasi kontemporer dari residu dalam sistem persamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Spesifikasi log-linear diadopsi di semua persamaan dalam sistem dan temuan empiris memberikan bukti yang menunjukkan bahwa efek flypaper tidak ada di sektor publik Nigeria dan faktor-faktor, yang meliputi; kompleksitas pajak, distorsi harga, ekspansi birokrasi dan efisiensi dalam pemungutan pajak, yang bertanggung jawab atas efek flypaper, secara statistik tidak signifikan.

Langer (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bagaimana lumsom pemerataan transfer mempengaruhi pengeluaran dan pajak di kotamadya terbesar negara bagian Nordrhein-Westfalen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bukti kuat untuk keberadaan efek flypaper dalam pengeluaran kotamadya di negara bagian Jerman, Rhine-Westphalia Utara. Langer menemukan bahwa transfer berbasis formula meningkatkan pengeluaran kota tetapi tidak mengurangi tarif pajak. Masalah endogenitas yang mungkin diatasi dengan menerapkan metode variabel

instrumental, di mana guncangan eksogen dari penyesuaian fungsi pembobotan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan fiskal digunakan sebagai instrumen. Variabel instrumental terbukti kuat dan relevan. Analisis berdasarkan kategori pengeluaran pada tingkat yang cukup terperinci dan penggunaan strategi identifikasi ini adalah novel dalam literatur tentang efek flypaper di Jerman.

Mulya (2016) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh hubungan flypaper terhadap pertumbuhan ekonomi oleh Pemerintah Daerah Banda Aceh menemukan hasil yang menunjukkan *Flypaper effect* pada PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada alokasi belanja modal pada kota banda aceh. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan PAD ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemda tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, *Flypaper effect* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada alokasi belanja modal pada kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan dana alokasi umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum adalah merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada tiap daerah sebagai konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah.

Oktavia (2014) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menunjukkan ada tidaknya *Flypaper effect* di kabupaten kota di Jawa Timur menunjukkan hasil yang sama bahwa data tahun 2003-2013 terjadi *Flypaper effect* yang ditunjukkan dengan pengaruh DAU lebih signifikan terhadap Belanja Daerah dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Kabupaten / kota di Jawa Timur umumnya mengalami

Flypaper effect terbukti atau diterima, respon BD masih lebih besar disebabkan oleh dana perimbangan khususnya yang berasal dari komponen DAU.

Amril, dkk (2015) yang menguji *Flypaper effect* terhadap kinerja keuangan membuktikan terjadinya *Flypaper effect* pada belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jambi terjadi karena variabel DA (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) memiliki pengaruh positif signifikan, dengan elastisitas yang rendah sehingga menunjukkan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi belum maksimal mengelola sumber sumber kekayaan alam yang bertujuan meningkatkan potensi daerah. Dengan demikian *Flypaper effect* dapat terjadi karena pencapaian pemberian dana transfer berupa dana alokasi kurang optimal meningkatkan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Yefirson dkk (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan kemampuan keuangan daerah dan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah serta untuk mendeteksi terjadinya *Flypaper effect*. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata IKK kabupaten induk sebesar 32,44 dan rata-rata IKK kabupaten pemekarannya sebesar 35,20. Hasil uji beda-t menunjukkan tidak ada perbedaan IKK kabupaten induk dan IKK kabupaten pemekarannya. Hasil regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah baik pada kabupaten induk maupun pada kabupaten pemekarannya. Tidak terjadi *Flypaper effect* pada kabupaten induk dan pemekarannya.

Irham (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Flypaper effect at The Local Government: An Empirical Analysis for Aceh Province*. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa efek flypaper ditemukan dalam kasus pengeluaran publik maupun infrastruktur. Studi ini juga menemukan bahwa faktor kelembagaan mampu mengurangi penggunaan transfer.

Mutiary (2017) dalam penelitiannya yang mengidentifikasi efek flypaper di tingkat provinsi dengan menggunakan cara yang diharapkan untuk mengetahui keberadaannya menemukan bahwa Efek Flypaper Ada di Indonesia dalam tahun 2004 - 2010. Efek flypaper ada di bawah persyaratan tingkat-tingkat tetapi belum ditentukan di bawah log-log istilah regresi. Persyaratan tingkat hasil sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan block grant per kapita meningkatkan pengeluaran per kapita lebih besar dari peningkatan serupa dalam pendapatan per kapita. Efek kumulatif akan lebih besar karena perbedaan antara peningkatan Block Grant Capita dan Income per Capita semakin besar. Keberadaan efek flypaper di Indonesia sejalan dengan prediksi teori.

Kusuma (2015) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menyelidiki pengaruh hibah tanpa syarat, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan kepadatan penduduk terhadap anggaran daerah di Provinsi Jawa Timur selama pelaksanaan desentralisasi fiskal menemukan hasil bahwa ada efek flypaper dalam anggaran daerah di Provinsi Jawa Timur selama 2012 - 2015. Hal ini ditunjukkan oleh elastisitas hibah tanpa syarat yang lebih tinggi daripada elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).) terhadap anggaran daerah. Secara intuitif, elastisitas transfer yang lebih tinggi mewakili birokrasi daerah yang responsif terhadap perubahan penerimaan transfer untuk meningkatkan anggaran dibandingkan dengan pendapatan daerah sendiri.

Sumarsono (2015) dalam penelitiannya yang ingin membuktikan fenomena *Flypaper effect* di Jawa Timur menemukan hasil bahwa Hasil perbandingan koefisien alokasi dana umum dan pendapatan daerah menunjukkan ada pengaruh flypaper terhadap pengeluaran daerah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur, karena koefisien alokasi dana umum lebih besar dari pendapatan daerah, dan keduanya secara signifikan $\text{dana alokasi umum} = 0,840443 > \text{pendapatan daerah} = -0,810229$).

Dengan demikian ada pengaruh flypaper dalam pengeluaran daerah 38 kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur, terbukti.

Subekan (2016) menganalisis pengaruh kebijakan moneter dan fiskal regional terhadap stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini juga hendak menganalisis dan mengidentifikasi terjadinya *Flypaper effect* pada belanja pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil menunjukkan bahwa Stimulasi Belanja Daerah yang ditimbulkan dari penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka desentralisasi berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah sendiri. Hasil analisis membuktikan bahwa sensitivitas respon belanja daerah dari pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjukkan dengan nilai *coefficient* regresi yang lebih besar. Hasil ini berarti bahwa fenomena *Flypaper effect* terjadi di Sulawesi Selatan.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Pemikiran

Halim (2002) dalam Ramadhani (2016) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Sebagaimana diketahui Kinerja merupakan pencapaian dari suatu usaha entah itu berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dan tentunya dari segi outcome. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan. Untuk melakukan pengukuran kinerja dengan melihat variabel kunci kemudian dikembangkan pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, dari sinilah kita bisa mengetahui kinerja suatu organisasi sudah sesuai dengan yang direncanakan meliputi ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain atau tidak. Jika tidak tercapai maka dikatakan bahwa pengukuran kinerja suatu organisasi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dan jika pencapaiannya melebihi dari yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa entitas tersebut memiliki kinerja yang sangat baik (Halim, 2012: 142).

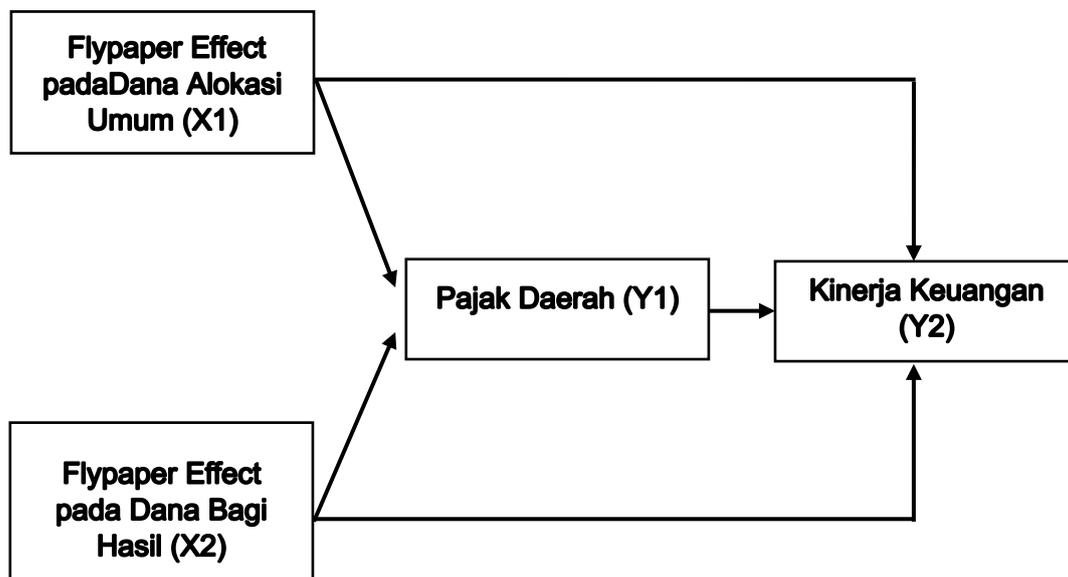
Transfer antar pemerintah sebagai bentuk dari kebijakan pelaksanaan otonomi dalam mengatasi fiscal gap merupakan salah satu sumber penerimaan penting pemerintah daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul dalam pembangunan antar daerah (Oates dalam Amril

2015) .Meskipun demikian pemberian transfer juga mengakibatkan ketidakefektifan pembiayaan pengeluaran daerah. Fenomena tersebut dikenal dengan flypaper effect yang mengandung pengertian: (1) terjadinya peningkatan pajak dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan, (2) elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap pajak daerah.

Dongori (2006) dalam Muda (2012) menyatakan bahwa dampak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah dan dikeluarkannya undang-undang No. 34 tahun 2000 yang membatasi pungutan pajak daerah dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan daerah dalam era otonomi ini. Keuangan daerah, terutama pada sisi penerimaan bisa menjadi tidak stabil dalam memasuki era otonomi ini. Sobel dan Holcombe (1996) dalam Andayani (2004) dalam Muda (2012) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran.

Berdasarkan referensi tersebut, Penelitian ini bertujuan mencari kejelasan tentang factor Flypapaper Effect yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kab/kota provinsi Sulawesi Selatan. Hubungan antar-antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 .Kerangka Pemikiran Teoritis penelitian ini, disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1 BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



3.2 Hipotesis Penelitian

3.2.2 Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Pajak Daerah

Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori stewardship didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para manajer dalam perusahaan sebagai pelayan (steward) dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya. Desentralisasi dilakukan dengan harapan daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonom yang nyata. Adanya otonomi daerah dituntut untuk dapat mengedepankan kemandirian daerah. Syarat utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya kemandirian dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan hal yang penting dalam daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah dan pembangunan yang tidak membutuhkan biaya. Dampak dari adanya otonomi daerah adalah semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memberikan suatu kebijakan tertentu. Kegiatan pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada, untuk itu kegiatan pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Secara

umum, Landiyanto (2005:19) menyatakan bahwa “semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif”. Adapun yang menjadi sumber-sumber PAD Kabupaten meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahab dkk tahun 2014 menyatakan bahwa kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2010-2014 diukur berdasarkan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, masuk dalam criteria daerah dengan tingkat ketergantungan yang masih Sangat Tinggi. Hal inilah yang menyebabkan tingkat Kemandirian Daerah Sangat Kurang, sehingga dengan sendirinya tingkat Desentralisasi Fiskal juga masuk dalam kriteria sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Enceng Dkk menyimpulkan bahwa Penerimaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purworejo sebagian besar dananya masih bersumber dari Alokasi Pemerintah Pusat, dengan rata-rata mencapai 82,68 % per tahun sedangkan PAD hanya mencapai 7,99 % per tahun. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut

H1.1: Terdapat Pengaruh Antara Flypaper Effect pada DAU secara langsung Terhadap Pajak Daerah

H1.2: Terdapat Pengaruh Antara Flypaper Effect pada DBH secara langsung Terhadap Pajak Daerah

3.2.1 Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Secara Langsung maupun Tidak Langsung melalui Pajak Daerah

Dari sudut pandang teori agensi, principal (pemilik atau top manajemen) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang efisien.

Teori ini mengasumsikan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan.

Flypaper effect atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat Pemerintah Daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer berupa DAU dari pada menggunakan sumber dana kemampuan sendiri (Sukriy dan Halim 2004; Maimunah 2006). Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja Pemerintah Daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi governansi (governance) terhadap aliran transfer itu sendiri. Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan pemerintahannya. Hal ini berarti Pemerintah Daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri daripada uang yang diterima dari pusat. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa perilaku fiskal Pemerintah Daerah dalam merespon transfer dari pusat menjadi determinan penting dalam menunjang efektivitas kebijakan transfer.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Muid tahun 2014 menyimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Atau dengan kata lain, pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih distimulus oleh jumlah DAU yang diterima pada tahun berjalan daripada PADnya sendiri. Ini membuktikan adanya flypaper effect dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD.

Prakosa (2004), Masdjojo (2009), dan Maimunah (2006). Para peneliti tersebut mengkaji pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah dengan mengambil sampel kabupaten/kota di Jawa Tengah, DIY, se-Indoensia dan Sumatera. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak semua PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan tidak semua PAD memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah dan tidak semua DAU mengalami flypaper effect. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut

H2.1: Terdapat Pengaruh Antara Flypaper Effect pada DAU Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pajak Daerah

H2.2 : Terdapat Pengaruh Antara Flypaper Effect pada DBH Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pajak Daerah

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi yaitu berusaha menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, dengan menyoroti hubungan yang telah dirumuskan sebelumnya (Nazir, 2003). Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (*dependen*) yaitu kinerja keuangan daerah, satu variabel *intervening* yaitu pajak daerah dan dua variabel bebas (*independen*) yaitu Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), dan Flypaper Effect pada Dana Bagi Hasil (DBH). Penelitian ini akan dilaksanakan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Jangka waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama dua bulan.

4.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data panel berupa data *time series* dari tahun 2014 sampai 2017 dan data *cross section* yakni data 24 kabupaten/kota. Data panel (*pooled data*) atau data longitudinal merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* adalah data yang memiliki banyak unit analisis yang dikumpulkan dalam satu waktu, sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu unit pengamatan. Data panel digunakan untuk melakukan analisis empirik yang tidak dapat dilakukan hanya menggunakan data *cross section* atau *time series*. Keuntungan menggunakan data panel yaitu: (1) dapat mengendalikan keheterogenan antar individu; (2) memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih beragam, mengurangi kolinearitas antar variabel, derajat bebas lebih besar dan lebih efisien; (3) dapat diandalkan untuk studi *dynamic of adjustment*; (4) mampu menganalisis dan mengurai perilaku model yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan model data *cross section* atau model data *time series*; (5) panel data lebih baik dalam mengidentifikasi dan

mengukur efek yang tidak bisa dideteksi oleh model data *cross section* atau model data *time series*; dan (6) dapat meminimalkan bias.

Sumber data penelitian ini bersumber dari laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yakni berupa Dana Alokasi Umum (DAU), dan data Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Daerah, dan Kinerja Keuangan Daerah tahun 2014 sampai 2017 yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Mengingat seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara data dikumpulkan dari instansi terkait antara lain Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Data tersebut diperoleh dari berbagai laporan/buku/*compact disk* yang dipublikasikan oleh instansi terkait. Data dan artikel pendukung penelitian dikumpulkan melalui website yang berupa referensi dari buku, makalah, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Dengan demikian, prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka.

4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian dan model penelitian, maka definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini antara lain:

- a. *Flypaper Effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika pemerintah daerah merespons belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer grants daripada pendapatan asli daerahnya tersebut, sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah.

- b. *Flypaper Effect* ini diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Formulasi perhitungan *Flypaper Effect* adalah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

- c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut.

$$\text{Rasio Ketergantungan DAU} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

- d. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) berupa dana bagi hasil atas jasa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

$$\text{Rasio Ketergantungan DBH} = \frac{\text{Realisasi DBH}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

- e. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2012:5) adalah “kontribusi atau iuran wajib oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”. Formulasi perhitungan Pajak Daerah adalah sebagai berikut

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

- f. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah prestasi atau hasil kerja yang dicapai perusahaan atau organisasi yang dilihat dari segi keuangannya (Supriono, 2000). Selain itu, kinerja

keuangan pemerintah merupakan cerminan atau hasil kerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumberdaya dan dapat diketahui posisi keuangan suatu daerah. Dalam penelitian ini kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio kemampuan fiskal (keuangan) daerah dinyatakan dalam persen. Rumus perhitungan rasio kemandirian daerah (halim, 2009):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (LRA)}} \times 100 \%$$

4.5. Teknik Analisis Data

4.5.1. Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif digunakan hanya untuk medeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel tersebut di ambil.

4.5.2 Analisis Jalur

Ghozali (2013:249), menyatakan bahwa: "Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori". Analisis jalur sendiri tidak menentukan hubungan sebab-akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner.

4.5.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

1. Uji Multilinearitas

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi antara variabel independen. Jika adanya korelasi antara variabel dependen dan variabel independen, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Pengertian variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).

Salah satu model yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *tolerance dan variance inflation factor (VIF)*. Keduanya menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dengan kata lain, setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Berikut adalah uraian kriteria pengukurannya (Ghozali, 2011) :

- a. Jika *tolerance* >10% dan *VIF* >10% , maka tidak terjadi multikolinearitas
- b. Jika *tolerance* <10% dan *VIF* <10%, maka terjadi multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual berdasarkan pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya. uji heteroskedastisitas muncul jika residual atau kesalahan dari model yang amati tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2011: 139). Untuk mengamati uji heteroskedastisitas, dapat diamati dengan grafik plot (*scatterplot*) dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan secara acak, tidak membentuk pola tertentu dan arah penyebaran titik-titiknya berada di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas, digunakan dua metode pengujian yaitu *p-plot of regression standarized residual* (metode grafik) atau dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. (Ghozali, 2011).

Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasar pada probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas >0,05 maka distribusi dan model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas <0,05 maka distribusi dan model distribusi dan model regresi adalah data tidak terdistribusi secara normal.

Pengujian secara visual dapat juga menjadi opsi untuk dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots* dan program SPSS, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi uji asumsi normalitas.
2. Jika data melebar jauh dari garis diagonal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

4.5.4. Model Analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi berganda (*multiple regression*). Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2005) bahwa analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan.

Berdasarkan kerangka konseptual (Gambar 3.1) dan metode analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*), maka dibentuk persamaan fungsi sebagai berikut:

$$Y_1 = \rho_{y_1X_1} + \rho_{y_1X_2} + \epsilon_1$$

$$Y_2 = \rho_{y2X1}X_1 + \rho_{y2X2}X_2 + \rho_{y2Y1}Y_1 + \varepsilon_2$$

Keterangan:

X_1	:	<i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum
X_2	:	<i>Flypaper Effect</i> Dana Bagi Hasil
Y_1	:	Pajak Daerah
Y_2	:	Kinerja Keuangan Daerah
ρ_{y1X1}	:	Koefisien Jalur <i>Flypaper Effect</i> pada DAU terhadap pajak daerah
ρ_{y1X2}	:	Koefisien Jalur <i>Flypaper Effect</i> pada DBH terhadap Pajak Daerah
ρ_{y2X1}	:	Koefisien Jalur <i>Flypaper Effect</i> Pada DAU Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
ρ_{y2X2}	:	Koefisien Jalur <i>Flypaper Effect</i> Pada DBH Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
ρ_{y2Y1}	:	Koefisien Jalur Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
e	:	<i>Error term</i>

4.5.5 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis sama artinya dengan menguji signifikansi koefisien regresi linear berganda yang terkait dengan pernyataan hipotesis penelitian (Sanusi, 2014). Uji hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah layak untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian. Pengujian ini dapat juga dilakukan dengan melihat probabilitas F_{hitung} . Apabila probabilitas nilai $F_{hitung} < 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

b. Uji Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas investasi, pengeluaran pemerintah, dan produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah (*variabel intervening*) dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependennya. Pengujian dilakukan dengan melihat probabilitas t_{hitung} . Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan: 1) Apabila probabilitas $t_{hitung} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen, dan 2) Apabila probabilitas $t_{hitung} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati dan Porter, 2011). Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas sangat terbatas.
2. Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Deskripsi Data Penelitian

5.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

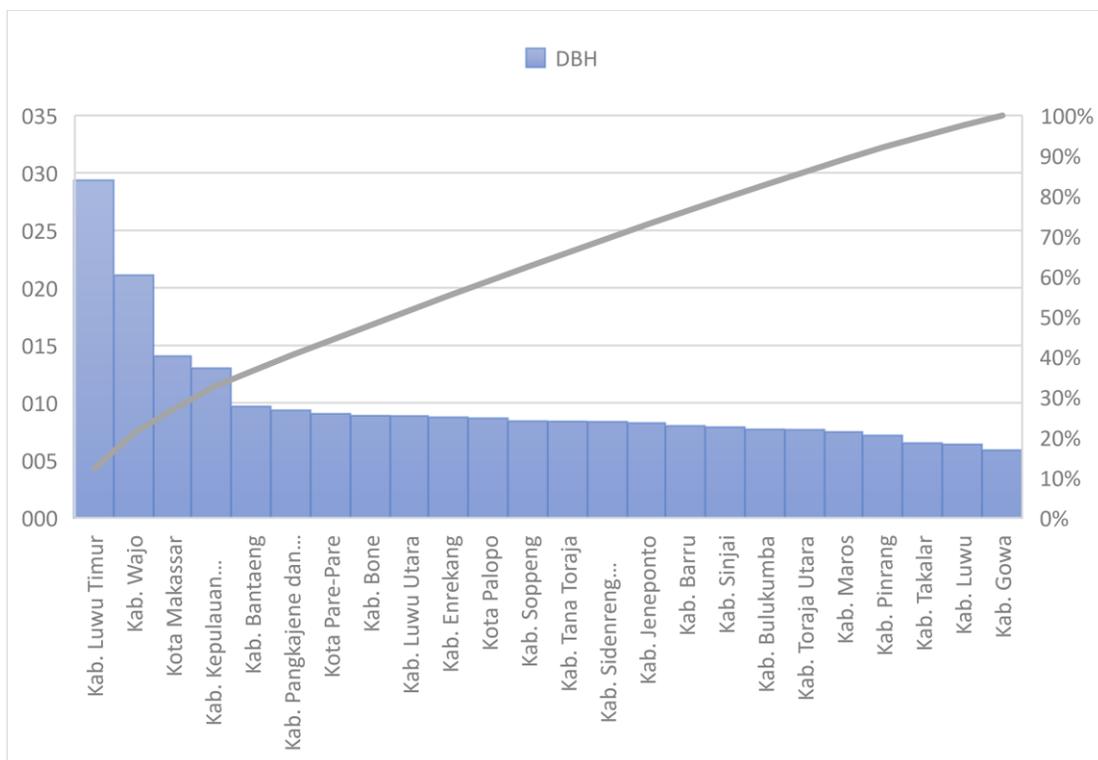
Deskripsi data bertujuan untuk menggambarkan variabel-variabel yang dikembangkan dalam penelitian ini yakni, variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), variabel *intervening* yakni pajak daerah, dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah.

5.1.1.1 Deskripsi Data Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antartingkat pemerintah yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sarana untuk kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan potensi daerahnya. Halim (2009) mengatakan bahwa ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26 persen dari Penerimaan dalam negeri. Untuk memperoleh nilai flypaper

effect pada dana alokasi umum yaitu menggunakan rasio ketergantungan DAU. Berikut hasil perhitungan nilai flypaper effect pada DAU selama 4 tahun berturut-turut :



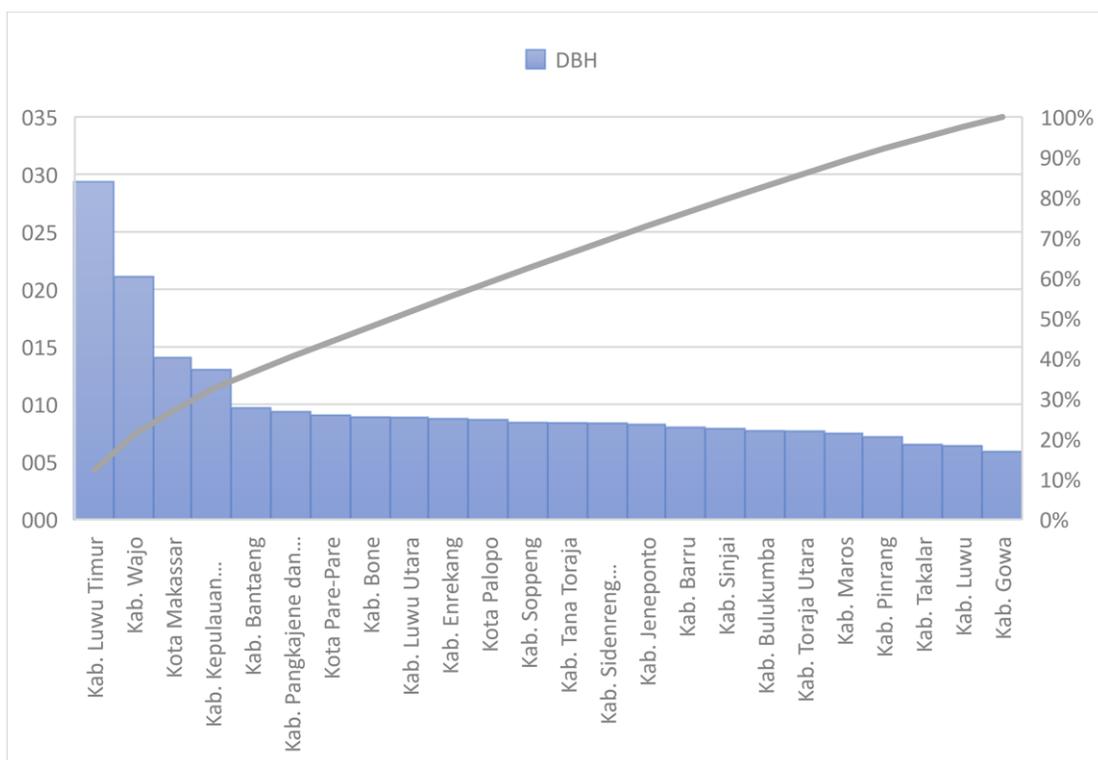
Gambar 5.1. Hasil Perhitungan nilai Flypaper effect Pada DAU Tahun 2014-2017

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh nilai flypaper effect DAU tertinggi selama 4 tahun diperoleh Kabupaten Toraja Utara dengan presentase di atas 90%. Hal ini mengindikasikan belanja daerah tersebut masih bergantung sekali pada dana transfer dalam bentuk Dana Alokasi Umum,. Sedangkan nilai flypaper effeccc DAU terkecil diperoleh Kabupaten Luwu Timur dengan memperoleh persentase hanya sebesar 60%

5.1.1.2 Deskripsi Data Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari pemberian DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal

vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. DBH itu sendiri dapat bersumber dari pajak dan sumber daya alam (SDA). DBH merupakan dana perimbangan yang bersifat *block grants* seperti DAU sehingga pengelolaan maupun penggunaannya merupakan wewenang pemerintah daerah. Untuk menghitung rasio Dana Bagi Hasil (DBH) menggunakan rasio ketergantungan DBH. Hasil perhitungan Rasio Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan selama empat tahun dapat dilihat pada gambar berikut:

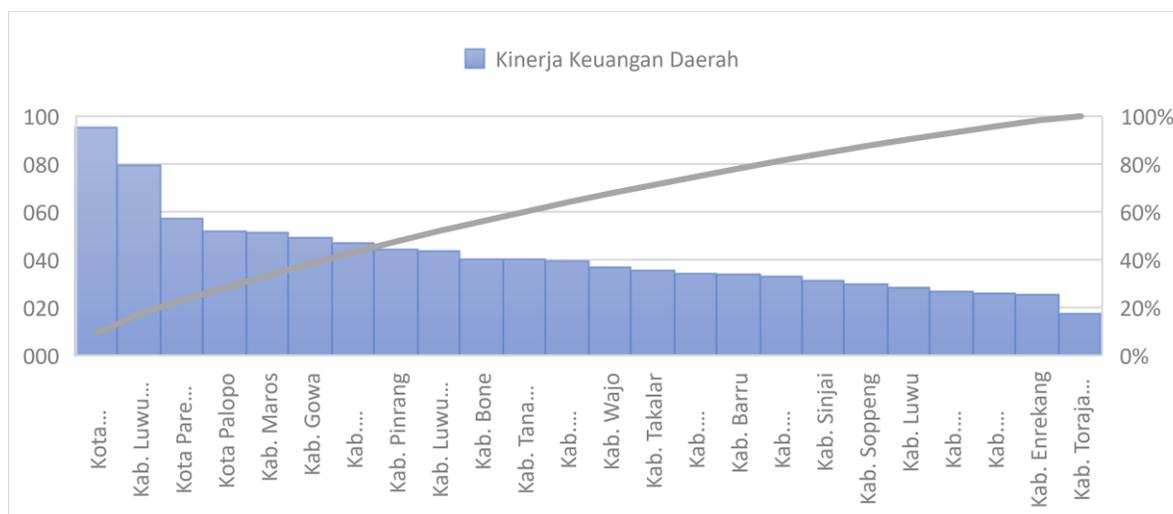


Gambar 5.2 : Hasil perhitungan nilai Flypaper Effect Pada DBH 2014-2017.

Berdasarkan gambar di atas presentase Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah dengan presentase tertinggi dalam hal merespon belanja daerah melalui dana bagi hasil. Adapun Presentase yang dimiliki daerah tersebut sebesar 84%. Sedangkan Kabupaten Gowa merupakan Daerah yang paling sedikit merespon belanja Daerah melalui Dana Bagi Hasil yaitu hanya sebesar 18%.

5.1.1.3 Deskripsi Data Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Ruziana,2017). Salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah yang dioptimalkan pengelolaannya adalah penerimaan dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Dalam penelitian ini Kontribusi Pajak Digunakan sebagai indikator Pajak Daerah. Berikut Data Kontribusi Pajak Kab/Kota pada Sulawesi Selatan selama 4 tahun :



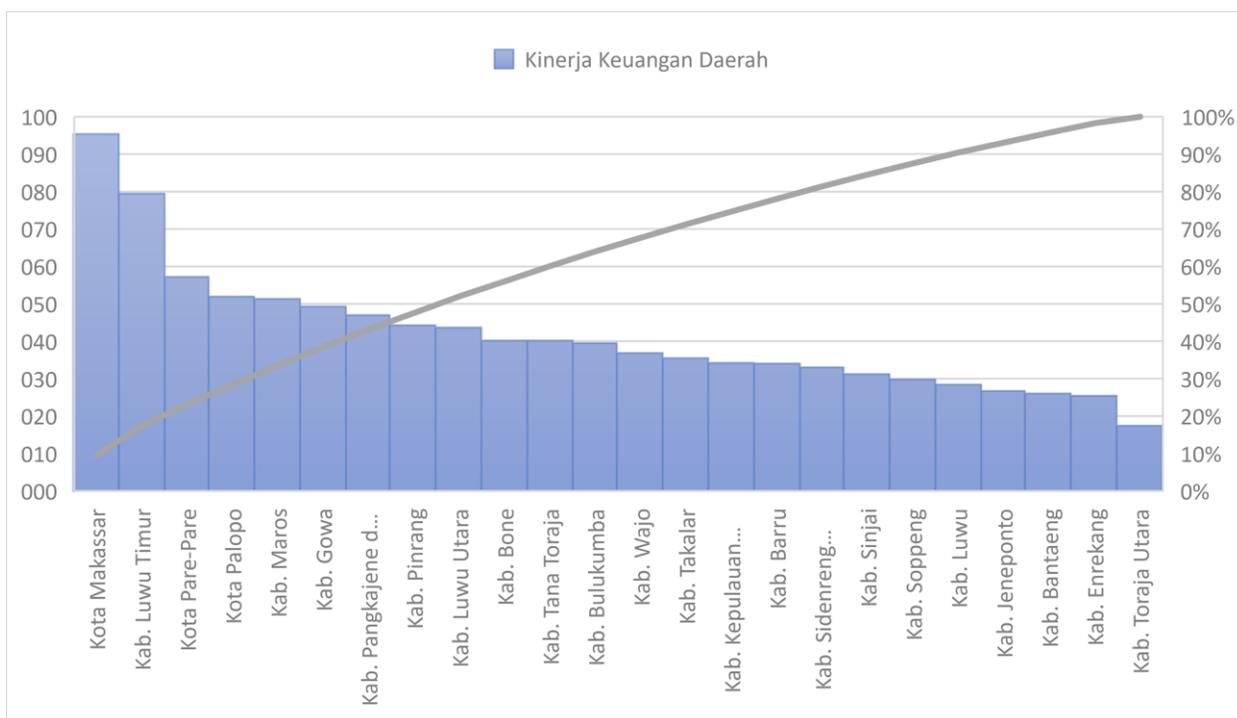
Gambar 5.3 : Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2014-2017

Berdasarkan gambar di atas presentase Kota Makassar merupakan daerah dengan presentase tertinggi dalam hal kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun Presentase yang dimiliki daerah tersebut sebesar 80 %.Sedangkan Kabupaten Tana

Toraja merupakan Daerah yang paling sedikit kontribusi Pajak Daerah terhadap Pajak Daerahnya yaitu hanya sebesar 18%.

5.1.1.4 Deskripsi Data Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah prestasi atau hasil kerja yang dicapai perusahaan atau organisasi yang dilihat dari segi keuangannya (Supriono, 2000). Selain itu, kinerja keuangan pemerintah merupakan cerminan atau hasil kerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumberdaya dan dapat diketahui posisi keuangan suatu daerah. Untuk menghitung rasio kemampuan keuangan daerah dapat menggunakan rasio kemandirian daerah. Hasil perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Daerah Selama empat tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 5.4 : Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2014-2017

Berdasarkan gambar di atas presentase Kota Makassar merupakan daerah dengan presentase tertinggi derajat kemandirian daerahnya. Adapun Presentase yang dimiliki daerah

tersebut sebesar 80 %. Sedangkan Kabupaten Toraja Utara merupakan Daerah yang paling rendah derajat kemandirian daerahnya yaitu hanya sebesar 18%.

5.1.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi serta nilai maksimum dan minimum. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKD	96	4.00	39.14	10.4033	5.40895
FE.DBH	96	1.00	11.21	2.4909	1.57418
FE.DAU	96	37.33	68.34	54.7858	6.85055
KONT.PAJAK	96	6.56	77.39	25.0653	16.47986
Valid N (listwise)	96				

Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Variabel. Sumber : Data Diolah, 2019

Untuk variable Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (X1), dari sejumlah 96 observasi diperoleh nilai minimum adalah sebesar 37,33 dan nilai maksimum sebesar 68,34. Rata-rata variabel Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum adalah sebesar 54,78 dengan standar deviasi sebesar 6,85. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa deskripsi variable Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum secara statistik terdistribusi secara normal.

Unruk variabel Dana Bagi Hasil (X2), dari sejumlah 96 observasi diperoleh nilai minimum adalah sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 11,21. Rata-rata variabel Dana Bagi Hasil adalah sebesar 2,49 dengan standar deviasi sebesar 1,57. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa deskripsi variabel Dana Bagi Hasil secara statistik terdistribusi secara normal.

Pada variabel kontribusi pajak daerah (Y1), dari sejumlah 96 observasi diperoleh nilai minimum adalah sebesar 6,56 dan nilai maksimum sebesar 77,39. Rata-rata variabel kontribusi

pajak adalah sebesar 26,06 dengan standar deviasi sebesar 16,47. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa deskripsi variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik terdistribusi secara normal.

Pada variabel kinerja keuangan daerah (Y2), dari sejumlah 72 observasi diperoleh nilai minimum adalah sebesar 4,00 dan nilai maksimum sebesar 39,14. Rata-rata variabel kinerja keuangan daerah adalah sebesar 10,40 dengan standar deviasi sebesar 5,40. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa deskripsi variabel kinerja keuangan daerah secara statistik terdistribusi secara normal.

5.2. Uji Asumsi Klasik Persamaan Y1

5.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent.

Uji asumsi multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflating Factor*). Jika nilai *tolerance* >0.10 dan VIF <10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas, begitu juga sebaliknya yaitu jika nilai tolerance <.0,10 dan VIF > 10, maka dapat disimpulkan terdapat multikolinearitas. Hasil penelitian yang baik menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas pada hasil penelitian. Hasil uji asumsi multikolinearitas pada penelitian ini terlihat pada tabel berikut.

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	FE.DBH	.937	1.068
	FE.DAU	.937	1.068

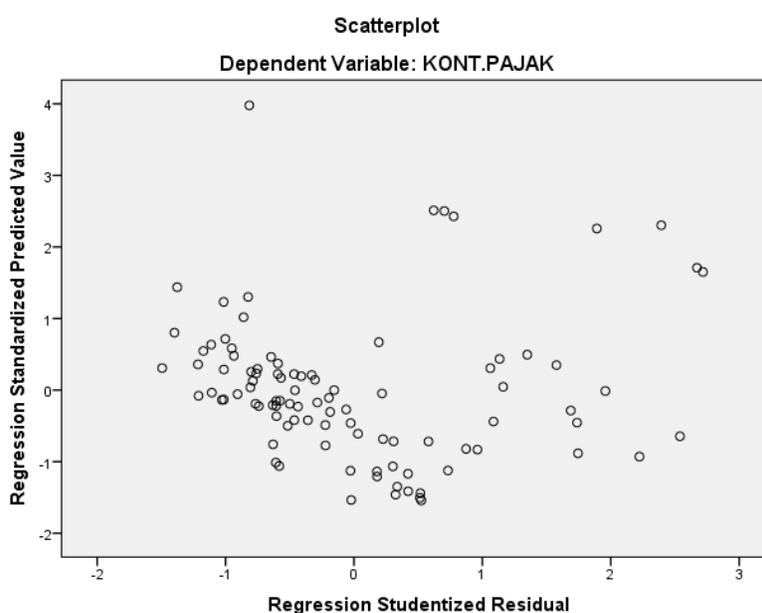
a. Dependent Variable: KONT.PAJAK

**Tabel 5.2. Uji Multikolinearitas. Sumber :
Data diolah 2019**

Berdasarkan Tabel 5.3, terlihat bahwa variabel penelitian menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas karena nilai tolerance $>0,1$ dan VIF <10 .

5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada *Scatterplot* regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. *Scatterplot* dapat dilihat pada output regresi dan disajikan dalam bentuk Gambar berikut :



Gambar 5.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

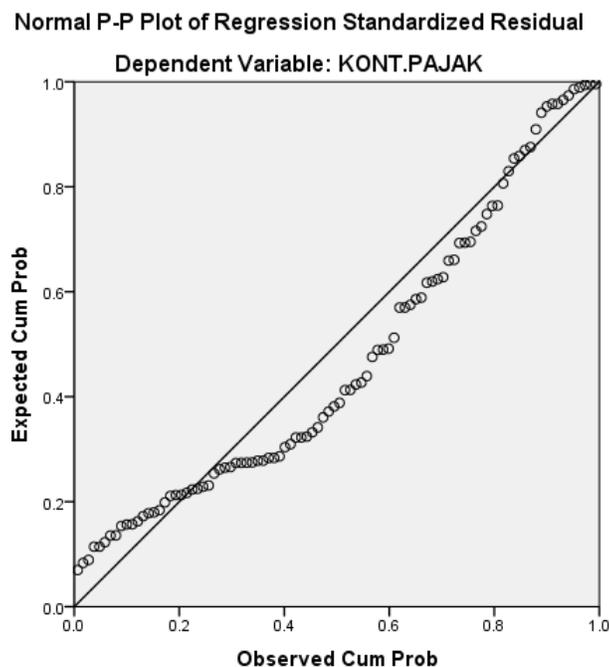
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan Gambar *Scatterplot* 5.5, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

5.3 Uji Normalitas Persamaan Y1

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dilihat dari grafik Normal *P-P Plot of regression standardized residual*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti

arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan, jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.6
Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas secara statistik dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian normalitas sebagaimana disajikan pada Lampiran 5, diperoleh nilai *Sig. Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,200. Nilai ini telah memenuhi syarat uji normalitas, yaitu jika hasil pengujian diperoleh nilai $Sig > 0.05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.

5.4 Uji Asumsi Klasik Persamaan Y2

5.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent.

Uji asumsi multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflating Factor*). Jika nilai *tolerance* >0.10 dan *VIF* <10 , maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas, begitu juga sebaliknya yaitu jika nilai *tolerance* <0.10 dan *VIF* > 10 , maka dapat disimpulkan terdapat multikolinearitas. Hasil penelitian yang baik menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas pada hasil penelitian. Hasil uji asumsi multikolinearitas pada penelitian ini terlihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Hasil Pengujian Asumsi Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
FE.DBH	.890	1.124
FE.DAU	.763	1.311
KONT.PAJAK	.736	1.359

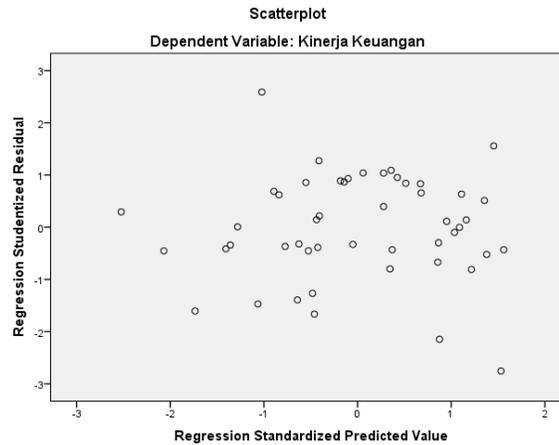
a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 5.3, terlihat bahwa variabel penelitian menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas karena nilai *tolerance* $>0,1$ dan *VIF* <10 ..

5.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada *Scatterplot* regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. *Scatterplot* dapat dilihat pada output regresi dan disajikan dalam bentuk Gambar 5.8.

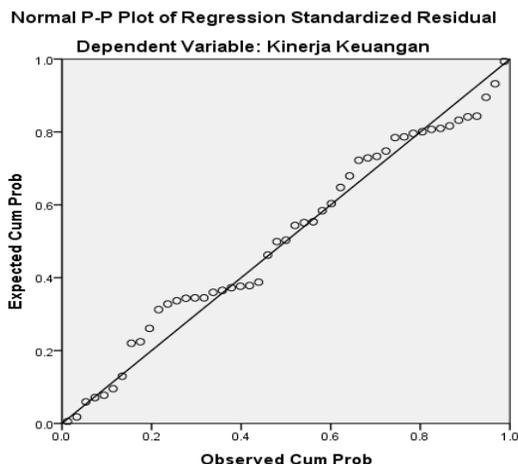


Gambar 5.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan Gambar *Scatterplot* 5.8, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

5.5 Uji Normalitas

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dilihat dari grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan, jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.8
Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dalam *penelitian* ini, pengujian normalitas secara statistik dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian normalitas sebagaimana disajikan pada Lampiran 5, diperoleh nilai Sig. Kolmogorov Smirnov sebesar 0,200. Nilai ini telah memenuhi syarat uji normalitas, yaitu jika hasil pengujian diperoleh nilai Sig > 0.05, maka asumsi normalitas terpenuhi..

5.6 Analisis Regresi Linear Berganda

5.6.1 Uji Kesesuaian Model (*Goodness of Fit*)

Untuk menentukan kelayakan model suatu penelitian adalah dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan ketepatan atau *goodness of fit model* yang digunakan.

Tabel 5.4 : Hasil Koefisien Determinasi

Model	Koefisien Determinasi		
	R-Square	F -Stat	Sig. F -Prob.
Y1	.264	16.688	.000
Y2	.529	34.438	.000

Berdasarkan Tabel 5.4, model untuk persamaan Y1 valid karena Prob (F-statistik) < prob $\alpha = 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (X1) dan Flypaper Effect pada Dana Bagi Hasil (X2) terhadap Kontribusi Pajak Daerah (Y1). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel prediktor (eksogen) dalam mempengaruhi variabel respons (variabel endogen) sebesar 26,4 persen, sedangkan sisanya 74,6 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

Hasil analisis pada Tabel 5.4, menunjukkan bahwa model untuk persamaan Y2 valid karena Prob (F-statistik) < prob $\alpha = 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (X1), Flypaper Effect pada Dana Bagi Hasil (X2), dan Kontribusi Pajak Daerah (Y1) terhadap kinerja keuangan daerah (Y2). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel prediktor (eksogen) dalam mempengaruhi variabel respons (variabel endogen) sebesar 52,9 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

5.6.2 Analisis Jalur

Hasil analisis jalur pada penelitian ini dengan menggunakan SPSS versi 22 sesuai Lampiran 6 sebagaimana terlihat pada Tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.5 Hasil Regresi *Direct Effect* Variabel-Variabel yang Diteliti

<i>Dirrect Effect</i>	Koefisien Regresi	<i>Standard Error</i>	t-Statistik	Prob. *)	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	-1,019	0,221	-4,607	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	2,131	0,962	2,214	0,029	Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	-0,295	0,065	-4,565	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	-0,195	0,261	-0,747	0,457	Tidak Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,161	0,026	5,871	0,000	Signifikan

Sumber: Lampiran 6, data diolah, 2019

Keterangan Tabel: *) $\alpha = 0,05$

Mengacu pada hipotesis penelitian yang menunjukkan signifikansi dan arah pengaruh maka dalam penelitian ini menggunakan signifikansi one tailed. Dimana penggunaan one tailed ketika arah hubungan variabel X dan Y sudah diketahui pengaruhnya. Berdasarkan hasil analisis data, maka estimasi persamaan penelitian adalah sebagai berikut:

$$1. Y1 = 5,809 - 1,019 X1 + 2,131 X2$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

- a. Konstanta sebesar 5,809 menyatakan bahwa jika nilai variabel eksogen dianggap nol ($X_1=0, X_2=0$), maka nilai pajak daerah sebesar 5,809
- b. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -1,019. Artinya apabila kenaikan nilai variabel Flypaper Effect pada Dana alokasi umum sebesar 1 persen akan menurunkan pajak daerah sebesar -1,019 persen.
- c. Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 2,131. Artinya apabila kenaikan nilai variabel dana bagi hasil sebesar 1 persen akan meningkatkan Pajak Daerah sebesar 2,131 persen.

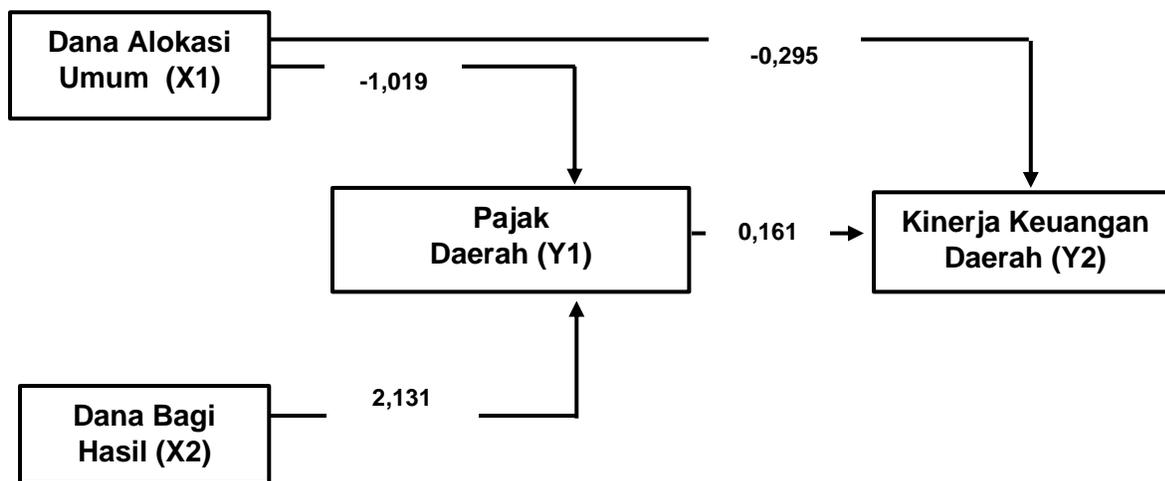
$$2. Y2 = 23,040 - 0,295 X1 - 0,195 X2 + 0,161 Y1$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

- a. Konstanta sebesar 23,040 menyatakan bahwa jika nilai variabel eksogen dianggap nol ($X_1=0, X_2=0, X_3=0$ dan $Y_1=0$), maka nilai kinerja keuangan daerah sebesar 23,040
- b. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -0,295 Artinya apabila Kenaikan nilai variable Flypaper Effect dana alokasi umum sebesar 1 persen akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar -0,295 persen.
- c. Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar -0,195. Artinya apabila Kenaika nilai variabel dana bagi hasil sebesar 1 persen akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar -0,195 persen.

- d. Koefisien regresi variable pajak daerah sebesar 0,161. Artinya apabila kenaikan nilai variabel pajak daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan kinerja keuangan daerah sebesar 0,161 persen.

Berdasarkan hasil analisis persamaan Y1 dan persamaan Y2, maka dapat dibuat hasil analisis model penelitian sebagaimana terlihat pada Gambar 5.10.



Sumber: Tabel 5.6, data diolah, 2019

Gambar 5.9
Kerangka Model Analisis Hasil Penelitian

Model analisis hasil penelitian sebagaimana Gambar 5.9, menunjukkan selain terdapat pengaruh langsung variabel eksogen dan variabel *intervening* terhadap variabel endogen, terdapat juga hubungan tidak langsung antara variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel *intervening*, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.7

variabel penelitian, diperoleh total pengaruh antar variabel baik pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel *intervening* sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Hasil Regresi *Direct Effect* dan *Indirect Effect (Total Effect)*

Pengaruh Antar Variabel	Pengaruh Variabel Penelitian		
	<i>Direct</i>	<i>Indirect</i>	<i>Total</i>
$(X_1 \rightarrow Y_2) + (X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2)$	-0,295	$(-1,019 \times 0,161)$	-0,4590

$(X_2 \rightarrow Y_2) + (X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2)$		2,131*0,161	0,343 ^s
-----------------------------------------------------------------	--	-------------	--------------------

Sumber: Lampiran 5, data diolah, 2019

Keterangan Tabel: ^{s)} Signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen
^{ts)} Signifikan diatas 5 persen

Bahwa dekomposisi hasil regresi *direct effect* dan *indirect effect (Total Effect)* pengaruh variabel penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang paling besar dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel Flypaper Effect pada Dana Bagi hasil terhadap variabel kinerja keuangan daerah secara tidak langsung melalui variabel pajak daerah dengan nilai pengaruh sebesar 0,343 dan pengaruh terkecil adalah pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum terhadap variabel kinerja keuangan daerah secara langsung dan tidak langsung melalui variabel pajak Daerah dengan nilai pengaruh sebesar -4,590

5.7 Pengujian Hipotesis Penelitian

Syarat terdukungnya suatu hipotesis penelitian adalah jika pengaruh dan/atau arah variabel sejalan dengan yang dihipotesiskan. Ada 4 hipotesis yang diuji dalam penelitian ini yaitu:

Hipotesis 1a. Pengaruh *flypaper effect* pada DAU terhadap Pajak Daerah

Hasil analisis regresi data dapat disimpulkan bahwa pengaruh *flypaper effect* pada dana alokasi umum terhadap pajak daerah adalah signifikan. Namun, nilai koefisien untuk variabel dana alokasi umum terhadap pajak daerah sebesar -1,019 menunjukkan arah pengaruh yang negatif. Nilai koefisien yang bertanda negatif mengindikasikan hubungan yang tidak searah searah. Artinya semakin tinggi flypaper Effect dana alokasi umum akan mengakibatkan semakin turun tingkat pajak daerah. Dengan demikian, Hipotesis 1a yang menyatakan bahwa *flypaper effect* pada dana alokasi umum berpengaruh negative dan signifikan terhadap pajak daerah **diterima**.

Hipotesis 1b. Pengaruh *flypaper effect* pada DBH terhadap Pajak Daerah

Hasil analisis regresi data dapat disimpulkan bahwa pengaruh *flypaper effect* pada dana bagi hasil terhadap pajak daerah adalah signifikan. Selain itu, nilai koefisien untuk variabel dana alokasi umum terhadap pajak daerah sebesar 2,131 menunjukkan arah pengaruh yang positif. Nilai koefisien yang bertanda positif mengindikasikan hubungan yang searah. Artinya semakin tinggi *flypaper Effect* dana bagi hasil akan mengakibatkan semakin naik tingkat pajak daerah. Dengan demikian, Hipotesis 1b yang menyatakan bahwa *flypaper effect* pada dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah **diterima**.

Hipotesis 2a. Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum terhadap kinerja keuangan daerah secara langsung maupun tidak langsung melalui pajak daerah

Hasil analisis regresi data menunjukkan bahwa pengaruh *Flypaper Effect* pada dana alokasi umum secara langsung terhadap kinerja keuangan daerah adalah signifikan. Sementara pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah melalui pajak daerah ekonomi juga signifikan. Artinya, pajak daerah dapat digunakan untuk memediasi pengaruh antara *flypaper effect* pada dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis 2a yang menyatakan bahwa pengaruh *flypaper effect* pada dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah secara langsung maupun tidak langsung melalui pajak daerah **diterima**

Hipotesis 2b. Pengaruh *flypaper effect* pada DBH terhadap kinerja keuangan daerah secara langsung maupun tidak langsung melalui pajak daerah

Hasil analisis regresi data untuk pengaruh *flypaper effect* pada dana bagi hasil tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan daerah namun dapat

berpengaruh apabila melalui pajak daerah. Artinya, pajak daerah mampu memediasi pengaruh *flypaper effect* pada dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan daerah di Sulawesi Selatan. Selain itu, nilai koefisien untuk variabel dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan melalui pajak daerah sebesar 0,343 menunjukkan arah pengaruh yang positif. dan dana bagi hasil Nilai koefisien yang bertanda positif mengindikasikan hubungan yang searah. Artinya semakin tinggi dana bagi hasil akan mengakibatkan semakin tinggi pajak daerah yang berdampak pada semakin tinggi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah melalui pajak daerah. Dengan demikian, Hipotesis 2c yang menyatakan bahwa *flypaper effect* pada dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah secara tidak langsung melalui pajak daerah **diterima**.

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Pengaruh *flypaper effect* pada DAU terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 1a menunjukkan bahwa pengaruh *flypaper effect* pada dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak daerah. Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi umum dapat digunakan untuk banyak tujuan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dana alokasi umum menjadi salah satu bagian dari dana perimbangan yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di daerah. Diharapkan dari pembangunan tersebut, memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di daerah. Sayangnya dengan bergantung dari Dana Alokasi tersebut Pemerintah tidak Fokus terhadap pengumpulan pajak daerah. Hal ini dibuktikan dari analisis hasil penelitian yang membuktikan dengan adanya kenaikan variable DAU sebesar 1% menyebabkan menurunnya variable pajak daerah sebesar 1%.

Hasil hipotesis ini sejalan dengan Teori *Fiscal illusion* yang mengemukakan bahwa *Flypaper effect* terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian

voters atau penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan dan keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut. Dalam penerapan desentralisasi fiskal, setiap daerah dituntut untuk membiayai sendiri pembangunan daerahnya. Padahal pendapatan daerah tidak mampu membiayai seluruh pengeluarannya. Oleh karena itu, transfer dana dari pemerintah pusat menjadi sumber penerimaan yang sangat dominan bagi pemerintah daerah. Pemerintah dalam kegiatannya akan menggunakan barang dan jasa dalam berbagai bentuk diharapkan dapat memenuhi tujuan dan keinginan masyarakat untuk mencapai kemakmuran. Tingginya kemakmuran suatu daerah menunjukkan baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amril (2015) dan Mulya (2016) yang menyatakan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada transfer yang tidak bersyarat dalam hal ini DAU. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana transfer. Setiap Transfer yang diterima pemerintah daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah yang salah satunya belanja modal. Hal ini tidak jauh berbeda dengan peran PAD sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kinerja keuangan daerah. Armawaddin, rumbia, aflat (2017) juga menyatakan bahwa dalam periode 2016–2017, dengan menggunakan model regresi parsial, terdeteksi adanya gejala *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).

Sedangkan Hasil yang ditemukan berbanding terbalik adalah penelitian Subekan (2016) yang menemukan bahwa respon belanja daerah dari pengaruh dana alokasi umum lebih besar daripada PAD, hal ini membuktikan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect*. Artinya, transfer pemerintah pusat memberikan

stimulus yang lebih kuat pada belanja pemerintah daerah ketimbang pendapatan daerah yang dihasilkan sendiri (PAD) untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini mengindikasikan sikap over-reaktif pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Namun, penggalan PAD yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah dan selanjutnya akan mengurangi kemampuan keuangan daerah.

6.2 Pengaruh Flypaper Effect Pada DBH Terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 1b menunjukkan bahwa pengaruh *flypaper effect* pada dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pajak daerah. Hasil hipotesis ini sejalan dengan Teori *Fiscal illusion* yang mengemukakan bahwa *Flypaper effect* terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian *voters* atau penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan dan keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut. Selain itu hasil ini juga sejalan dengan teori federalism fiskal. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui desentralisasi fiskal sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penerapan desentralisasi fiskal, setiap daerah dituntut untuk membiayai sendiri pembangunan daerahnya. Padahal pendapatan daerah tidak mampu membiayai seluruh pengeluarannya. Oleh karena itu, transfer dana dari pemerintah pusat menjadi sumber penerimaan yang sangat dominan bagi pemerintah daerah. Pemerintah dalam kegiatannya akan menggunakan barang dan jasa dalam berbagai bentuk diharapkan dapat memenuhi tujuan dan keinginan masyarakat untuk mencapai kemakmuran.

Tingginya kemakmuran suatu daerah menunjukkan baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil hipotesis ini sejalan dengan Teori stewardship teori yang mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah

Temuan hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armawaddin, rumbia, aflat (2017) yang menyatakan bahwa dalam periode 2016–2017, dengan menggunakan model regresi parsial, terdeteksi adanya gejala flypaper effect pada belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Penelitian yang dilakukan oleh Enceng Dkk menyimpulkan bahwa Penerimaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purworejo sebagian besar dananya masih bersumber dari Alokasi Pemerintah Pusat, dengan rata-rata mencapai 82,68 % per tahun sedangkan PAD hanya mencapai 7,99 % per tahun.

Hasil yang ditemukan berbanding terbalik dengan penelitian Subekan (2016) yang menemukan bahwa respon belanja daerah dari pengaruh dana alokasi umum lebih besar daripada PAD, hal ini membuktikan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect*. Artinya, transfer pemerintah pusat memberikan stimulus yang lebih kuat pada belanja pemerintah daerah ketimbang pendapatan daerah yang dihasilkan sendiri (PAD) untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini mengindikasikan sikap over-reaktif pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Namun, penggalian PAD yang

hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah dan selanjutnya akan mengurangi kemampuan keuangan daerah.

6.3 Pengaruh *flypaper effect* pada DAU terhadap kinerja keuangan daerah secara langsung maupun tidak langsung melalui pajak daerah

Hasil pengujian Hipotesis 2a menunjukkan bahwa *flypaper effect* pada dana alokasi umum berpengaruh secara negative signifikan langsung terhadap kinerja keuangan daerah dan tidak langsung melalui pajak daerah.

Hasil hipotesis ini sejalan dengan Teori *Fiscal illusion* yang mengemukakan bahwa *Flypaper effect* terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian *voters* atau penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan dan keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut. Dalam penerapan desentralisasi fiskal, setiap daerah dituntut untuk membiayai sendiri pembangunan daerahnya. Padahal pendapatan daerah tidak mampu membiayai seluruh pengeluarannya. Oleh karena itu, transfer dana dari pemerintah pusat menjadi sumber penerimaan yang sangat dominan bagi pemerintah daerah. Pemerintah dalam kegiatannya akan menggunakan barang dan jasa dalam berbagai bentuk diharapkan dapat memenuhi tujuan dan keinginan masyarakat untuk mencapai kemakmuran. Tingginya kemakmuran suatu daerah menunjukkan baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah

Temuan hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarsono (2017) dan Nasution (2017) yang menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* di kabupaten/kota di Jawa Timur dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan Dana transfer dibandingkan dengan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan pengeluaran menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah menggunakan anggaran untuk kepentingan publik yang dapat

merangsang pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan Kemampuan keuangan antar daerah dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

6.4 Pengaruh *flypaper effect* pada DBH terhadap kinerja keuangan daerah secara langsung maupun tidak langsung melalui pajak daerah

Hasil pengujian Hipotesis 2B juga menunjukkan bahwa *flypaper effect* pada dana bagi hasil tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan daerah namun dapat berpengaruh positif apabila melalui pajak daerah. Hal ini didasarkan pada keberhasilan suatu daerah dalam penghasilan pajak dan sumber daya alam daerahnya masing-masing. Apabila suatu daerah mendapat penghasilan pajak daerah dan hasil pengelolaan sumber daya alam yang besar, maka penerimaan alokasi DBH juga akan besar. Selain itu *flypaper effect* DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan melalui pajak daerah, Ini berarti bahwa semakin besar alokasi dana bagi hasil yang diterima, maka akan dapat meningkatkan pajak daerah yang juga berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena realisasi dana bagi hasil yang diterima secara keseluruhan berkontribusi untuk pembangunan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang artinya akan menandakan peningkatan kemandirian daerah.

Dana bagi hasil berupa dana bagi hasil atas jasa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil dikategorikan sebagai *block grant* yaitu kewenangan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah

daerah dapat mengoptimalkan penggunaan dana bagi hasil untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini dikarenakan daerahlah sebagai penghasil dan pengelola kekayaan daerah itu sendiri yang digunakan untuk membangun dan mensejahterakan daerahnya. Artinya, semakin sejahtera suatu daerah maka kinerja keuangan daerah tersebut semakin tinggi.

Dalam teori *fiscal federalism* diungkapkan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan publik melalui pengelolaan *revenue* dan *expenditure* antar pemerintah. Esensi desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan maupun keleluasaan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritasnya. Desentralisasi fiskal menerapkan prinsip *money follow function*. Setiap penyerahan kewenangan kepada pemerintah di bawahnya menimbulkan konsekuensi pada anggaran yang dibutuhkan. Pelimpahan kewenangan tersebut harus diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan kepada pemerintah daerah. Penyerahan sumber dana kepada pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pemberian transfer ke daerah berupa dana bagi hasil. Selain itu teori federalisme fiskal menekankan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi program yang direncanakan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah demi meningkatkan kemandirian daerah.

Temuan hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarsono (2017) dan Nasution (2017) yang menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* di kabupaten/kota di Jawa Timur dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan Dana transfer dibandingkan dengan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan pengeluaran menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah menggunakan anggaran untuk kepentingan publik yang dapat

merangsang pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan Kemampuan keuangan antar daerah dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Flypaper Effect pada DAU berpengaruh terhadap pajak daerah. Hal ini sesuai dengan teori ilusi fiskal yang menurut Hewitt (1989) yang terjadi karena asimetris informasi Pemerintah pusat tidak memahami sepenuhnya kapasitas fiskal daerah dan situasi seperti ini justru dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan kebutuhan fiskalnya dalam rangka untuk memperoleh dana transfer yang besar. Dengan begitu menandakan semakin tinggi respon daerah terhadap DAU, maka semakin rendah respon Daerah terhadap Pajak Daerah yang berarti daerah masih menggantungkan belanja daerah terhadap DAU untuk pembangunan daerahnya.
2. Selanjutnya, Flypaper Effect pada DBH berpengaruh terhadap pajak daerah. Hal ini sesuai dengan teori stewardship yang menurut Putro (2013) mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Dengan begitu menandakan semakin tinggi respon Daerah terhadap DBH semakin tinggi pula respon daerah terhadap Pajak Daerah. Meski daerah menggantungkan belanja daerah terhadap DBH,

namun secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi kenaikan pajak daerah yang berkontribusi terhadap PAD daerah tersebut.

3. Flypaper Effect Pada DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah secara langsung. Hal ini sesuai dengan teori ilusi fiskal yang terjadi karena asimetris informasi Pemerintah pusat tidak memahami sepenuhnya kapasitas fiskal daerah dan situasi seperti ini justru dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan kebutuhan fiskalnya dalam rangka untuk memperoleh dana transfer yang besar. Dengan begitu menandakan semakin tinggi respon daerah terhadap DAU, maka semakin rendah tingkat kemandirian daerah yang berarti daerah masih menggantungkan belanja daerah terhadap DAU untuk pembangunan daerahnya.
4. Kemudian Flypaper Effect Pada DBH tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan teori federalism fiscal yang menurut Bird menggambarkan pemerintah pusat sebagai penafsir arif aspirasi masyarakat, yang memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan untuk menjamin lembaga-lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai keinginan pusat (dengan asumsi sesuai keinginan seluruh rakyat). Bahkan walaupun tak semua pemerintah pusat tidak sedemikian arif, aturan-aturan ini mungkin masih dapat memberikan rujukan yang bermanfaat dalam hubungan fiskal antar pemerintahan .
5. Flypaper Effect Pada DAU berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan daerah melalui pajak daerah. Hal ini sejalan dengan *Fiscal illusion* yang mengemukakan bahwa *Flypaper effect* terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian *voters* atau penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan dan keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut. Dalam penerapan

desentralisasi fiskal, setiap daerah dituntut untuk membiayai sendiri pembangunan daerahnya.

6. Kemudian, Flypaper Effect Pada DBH berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan daerah melalui pajak daerah. Hal ini sejalan dengan teori federalisme fiskal yang menekankan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi program yang direncanakan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah demi meningkatkan kemandirian daerah

7.2. Implikasi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada akuntansi sektor publik, khususnya dalam hal kinerja keuangan yang secara teoritis dapat memberikan bukti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi fenomena *flypaper effect*. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi kepada pola kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan pemerintah secara optimal membelanjakan dana alokasi umum, dan dana bagi hasil bagi peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah untuk peningkatan produktivitas daerah dan pendapatan daerah menuju kemandirian daerah sebagai wujud keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

7.3. Keterbatasan

1. Penelitian ini mengabaikan faktor- faktor lain seperti tidak melihat kondisi daerah sesungguhnya di lapangan namun hanya berdasarkan data yang tertera pada laporan realisasi anggaran yang sudah terpublikasi pada situs direktorat jendral peimbangan keuangan

2. Penelitian atau data observasi yang digunakan hanya pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga belum dapat mewakili seluruh kabupaten dan kota di Indonesia

7.4. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan penelitian, direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan perlu memanfaatkan dana alokasi umum bukan diprioritas kepada belanja daerah secara proporsional antara belanja rutin yang konsumtif dengan belanja pembangunan yang lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana-dana publik yang secara nyata diharapkan dapat meningkatkan produktivitas daerah.
2. Pemerintah daerah perlu membuka akses pendukung perekonomian melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang diarahkan bagi pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah.
3. Pemerintah daerah dalam membelanjakan dana perimbangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil dilakukan dengan efektif dan efisien sebagaimana belanja pemerintah menggunakan pendapatan asli daerahnya sehingga mencegah terjadinya *flypaper effect* demi tercapainya tujuan pembangunan di daerah yakni membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi,dan Setyawan. 2008. *Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal*. Simposium Nasional Riset Ekonomi & Bisnis Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Universitas Parahyangan. Bandung.
- Nur, N.A dan Arsyi. H. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol. VII No.2 Hal.12-27*.
- Amir, Junaidi, dan Yulmardi. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*. Jambi: IPB Press.
- Erfit Amril, S.M. 2015. Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah Vol.2 Nomor 3, Januari-Maret 2015*.
- Amuka,E dan Asogwa . 2016. Government Spending Pattern And Macroeconomics Stability In Nigeria : A Vector Autoagresive Model. *International Journal Of Economics And Financial Issues Vol.9 No.4*.
- Aydin,A. dan Yilmaz . 2016. The Analysis Of Visible Hand Of Government The Threshold Effect Of Government Spending On Economic Growth. *International Journal Of Trade,Economics And Finance Vol.7, No.5*.
- Bahl, R.W. dan Wallace, S. 2001. *Fiscal Decentralization: The Provincial local Dimension*. Fiscal Policy Training Program Fiscal Decentralization Course . World Bank Institute And Georgia State University, Andrew Young School Of Policy Studies.
- Hariadi, B. 2002. *Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang*. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Bappenas. 2007. *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*. Jakarta: Bridge.
- Basri, Delis, dan Junaidi . 2014. Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah 1(2)*, 81-90.
- Detisa,Dora. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonom Khusus Pada Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam*. Tesis. Medan : Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Devita, dan Delis. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah Vol.2. Nomor 2, Oktober-Desember 2014*.
- Laporan Realisasi Anggaran dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 - 2017*. Jakarta : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.
- Donaldson, L.,dan Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*, 16: 49-64.
- Ekawarna, S.U. 2017. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk Dan Pemekaran Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif*

Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 3, Januari – Maret 2017 Issn: 2338-4603 (Print); 2355-8520 (Online).

- Fauza, N. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Se Sumatera). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi USU* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Halim, A. & Kusufi, S. 2016. *Teori, Konsep Dan Aplikasi-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, Salemba Empat.
- Hartati. 2009. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Sebelas Maret .
- Hood, C. 1991. A Public Management For All Seasons. *Public Administration*, Vol.69: 3-19.
- Ilmiyah, Dewata, dan Sarikardawati. 2017. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* Vol. 5 No. 1, July 2017, 147-162.
- Junita, L.Z. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Eksekutif*. Universitas Jambi
- Kuncoro. H 2007. Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X
- Lawton, A. dan Rose, A.G. 1994. *Organization And Management In Public Sector*. Second Edition Editor. Pitman Publishing. London.
- Lesmana Dan Sukartha. 2017. Pengaruh Manajemen Laba Pada Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015. *Issn: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.19.2. Mei (2017): 1060-1087
- Lucky, D. 2013. Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth And Poverty Through Capital Expenditure (Case Study Of 38 Regencies/Cities In East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development* Vol.4, No.19, 2013. ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online)
- Maimunah, M. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. Padang*. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Masdjoko, dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Telaah Manajemen* Volume 6, Maret 2009, Hal 32-50. Jawa Tengah. Universitas Stikubank.
- Menyah, Dan Rufoel. 2013. Government Expenditure And Economic Growth: The Ethiopian Experience 1950-2007. *Journal Of Developing Area*. Tennessee State University College.

- Muda, I. 2012. Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan & Bisnis* Volume 4 No. 1, Maret 2012.
- Murwaningsari, E. 2009. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Volume 11 Nomor 1 Hal 30- 34.
- Nasution,N,A. 2010. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Nugraheni,P dan Subaweh,I. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 13 No. 1 April 2008.
- Prakosa, K.B. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Prediksi Belanja Daerah(Studi Empiris Di Provinsi Jawa Tengah Dan DIY). *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia* Vol.8 no.2, 101-118.
- Pratini, dan Astika. 2013. Fenomena Pergantian Auditor Di Bursa Efek Indonesia. Issn: 2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.2 (2013): 470-482.
- Qomariyah,N. 2018. Analisis Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten Jombang. *Margin Eco: Jurnal ekonomi dan Perkembangan Bisnis* Vol. 2 No.1 Mei 2018 Hal. 1-21.
- Ramadhani,F. 2016. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.14, No.01 Juni 2016.
- Rondinelli,Mccollough,Johnson. 1989.Analysing Decentralization Policies In Developing Countries.A Political Economic Framework Development And Change. *International Institutes Of Social Studies The Hague* Volume 20 Issue 1.
- Rondonuwu, S. Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) Kabupaten Minahasa Selatan. 2016. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4 (1).
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W. dan Yudiaatmaja, F. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha* Vol.4.
- Siddik, M & Robert S. 2001. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Sidiq, M. 2016. Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (Ikk) Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia .*E-Journal Universitas Lampung*.
- Siregar, S.V. 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Yogyakarta: Lp3es.
- Subekan,A. 2012. Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empris Pada Kab/Kota Prov. Sulawesi Selatan 2008-2012)

Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Vol.I/XII/2014 - ISSN 0852-6737 : 79-101

Sukarsa Dan Muryawan. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* Issn : 2337-3067 5.2 (2016) : 229-252

Sularso, H, dan Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi* Vol.1 No.2: 109-124.

Sulistiarni, E. dan Sudarno. 2012. Analisis Faktor-Faktor Pergantian Kantor Akuntan Publik (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010) *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 1 Nomor 1 Hal: 1-12

Syamsi, I. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional*. Jakarta : CV Rajawali.

Udoka Dan Anyingang. 2015. The Effect Of Public Expenditures On The Growth And Development Of Nigeria Economy. *International Review Of Management And Business Research* Volume 4(3), 823-833.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.